

**KOMUNITAS POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015**

(Studi Pada Tokoh Adat Sai Batin dan Nahdlatul Ulama (NU))

(TESIS)

Oleh

RICKY ARDIAN



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

KOMUNITAS POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015

(Studi Pada Tokoh Adat Sai Batin dan Nahdlatul Ulama (NU))

Oleh

RICKY ARDIAN

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat merupakan pilkada pertama kali dilaksanakan yang diikuti empat pasangan calon. Dalam pilkada tentu tidak bisa dipisahkan dari peran serta komunitas politik, seperti ormas atau LSM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komunitas Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, menganalisis mengapa komunitas politik berperan dalam pilkada serta menganalisis dampak komunitas politik setelah pilkada. Tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran komunitas politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015 melalui representasi politik, yaitu (1). *Symbolic Representation*, keterwakilan kultur yaitu tokoh adat Sai Batin dan NU berupa sosialisasi, musyawarah antarkader dan dengan pemerintah daerah. (2). *Descriptive Representation*, tokoh adat Sai Batin dan NU memiliki peran besar berupa kerjasama dengan KPUD, mengadakan pengajian akbar, adanya kemiripan dari komunitas politik dalam langkah dukungan pada pilkada. (3). *Substantive Representation*, aktivitas untuk memperjuangkan kepentingan yang direpresentasikan pada kepentingan khalayak seperti Sai Batin dan NU mengutamakan komunikasi pada semua kandidat agar tercipta hubungan baik dengan harapan calon yang didukung bisa menang. Komunitas politik ini berperan karena memiliki kesadaran politik aktif, adanya orientasi kepentingan dan adanya tujuan yang berkelanjutan. Implikasi atau dampak yang diperoleh komunitas politik adalah adanya timbal balik kepentingan dengan pemerintah Pesisir Barat yaitu mendapatkan bantuan dana untuk kesejahteraan kepengurusan komunitas.

Kata Kunci: Peran, Komunitas Politik dan Pilkada.

ABSTRACT

POLITICAL COMMUNITY IN REGIONAL HEAD ELECTION OF PESISIR BARAT REGENCY 2015

(Studies in traditional figure Sai Batin and Nahdlatul Ulama (NU))

**BY
RICKY ARDIAN**

Regional head election in Pesisir Barat was the first regional head election held. It was followed by four candidate pairs. Certainly, in the regional head election it can not be separated from the participation of political communities, such as civil society organizations. This study aims to find out the Role of Political Communities in the Regional Head Election, to analyze why the political community plays a role in the elections and to analyze the impacts of the political community after the elections. Design of this study was descriptive qualitative. Data collection techniques used were interview and documentation. The results of this study indicate that the role of political community in Pesisir Barat regional head election 2015 through political representation, is (1). Symbolic Representation, representation of culture which is the traditional character of Sai Batin and NU in the form of socialization, deliberation between cadres and local government. (2). Descriptive Representation, indigenous leaders Sai Batin and NU have a big role in the form of cooperation with KPUD, holding a grand ceremony, the similarity of the political community in supporting the regional head election (3). Substantive Representation, activities to fight for public interests, such as Sai Batin and NU prioritize communication on all candidates to create good relationships in hope that a supported candidate can be a chief of Pesisir Barat regency. This political community plays a role because it has an active political awareness, an interest orientation and a sustainable purpose. The implications or impacts of the political community are the reciprocity of Pesisir Barat government in obtaining financial support for the welfare of community stewardship.

Keywords: Role, Political Community and Regional head election.

**KOMUNITAS POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015
(Studi Pada Tokoh Adat Sai Batin dan Nahdlatul Ulama (NU))**

Oleh

RICKY ARDIAN

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Tesis : **KOMUNITAS POLITIK DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PESISIR
BARAT TAHUN 2015
(Studi pada Tokoh Adat Sai Batin dan Nahdlatul
Ulama (NU))**

Nama Mahasiswa : **Ricky Ardian**

No. Pokok Mahasiswa : **1526021005**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP 19680112 199802 1 001

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ari Darmastuti, M.A.

Penguji Utama : Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.

Sekretaris : Budi Harjo, S.Sos., M.IP.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 12 Mei 2017

PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan Judul : **"Komunitas Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 (Studi pada Tokoh Adat Sai Batin dan Nahdlatul Ulama (NU))"**, adalah karya saya sendiri dan tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing dan Penguji dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2017
Yang Membuat Pernyataan,




Ricky Ardian
NPM. 1526021005

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Biha Krui, Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 12 April 1991, anak ketiga dari tiga bersaudara, buah cinta dari Bapak Hi. Malipul Bahri dan Hj. Ayuna Kartini (Almarhumah).

Jenjang Akademik Penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Biha, Kecamatan Pesisir Selatan diselesaikan tahun 2004, Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Mardhotillah Kecamatan Pesisir Selatan Pada Tahun 2007, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang diselesaikan pada tahun 2010.

Tahun 2010, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung (Unila) melalui jalur Penelusuran Kemampuan Akademik Bakat (PKAB) selesai ditahun 2014. Tahun 2014 semasa mengerjakan tugas akhir/Skripsi Penulis menjadi Asisten Dosen (Dr. Suwondo, M.A) di Jurusan Ilmu Pemerintahan mengajar Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik, Teori Politik, Sistem Politik Indonesia, Pemilihan Umum dan Mata Kuliah Politik Identitas.

Disamping itu Penulis juga ikut serta terlibat menjadi anggota peneliti yang di Ketuai oleh Dr. Suwondo, M.A., diantaranya; Buku Putih Sanitasi Tulang Bawang Barat 2014, Strategi Sanitasi Kabupaten Tulang Bawang Barat 2014, Model Pengembangan Agrobisnis Terpadu Kabupaten Tulang Bawang Barat

2015, Kajian Potensi Ekonomi Kreatif Kabupaten Tulang Bawang Barat 2015, Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Untuk Mendukung Sektor Pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan 2015, Strategi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Pedesaan di Kabupaten Tulang Bawang 2016.

Tahun 2015, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa S2 Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Konsentrasi Politik Lokal & Otonomi Daerah FISIP Universitas Lampung selesai tahun 2017. Organisasi Formal semasa kuliah yang Penulis ikuti adalah Anggota HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA 2010-2011 Anggota *Center for Election and Political Party* (CEPP) FISIP UNILA 2014 sampai sekarang dan Kabiro 1 bidang akademik HIMA PASCA MIP Unila 2015-2017. Saat ini Penulis bekerja dan mengabdikan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung.

MOTTO

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”.
(Aristoteles)

“Segala kemungkinan bisa saja terjadi, artinya tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sulit di dunia ini, jika kita ingin belajar dan mengamalkannya”.
(RICKY ARDIAN)

“Mencoba adalah membangun kesempatan untuk berhasil”

“Mengutamakan kebutuhan bukan keinginan”.
(RICKY ARDIAN)

PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan hasil karya yang sederhana
Untuk orang-orang yang berharga dalam hidupku:**

“Ayahanda”

Hi. Malipul Bahri yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi selama ini dengan kasih sayang tulus tanpa pamrih yang diiringi doa restu kepada Allah SWT.

“Almarhumah Ibunda”

Wanita terhebat yang aku sayangi Ayuna Kartini, selalu menjadi semangat dan hadir dalam mimpiku.

“Untuk Ibunda”

Untuk Engkau yang Selalu Ku Cinta,
Untuk Engkau Pengobat Luka
Untuk Engkau yang selalu Ku Rindu,
Tujuh Belas Tahun Kita Bersama
Tujuh Belas Tahun Engkau Membina,
Tujuh Belas Tahun yang Penuh Suka- Cita
Kini Aku Merindukan Masa- Masa itu,
Dimana Kita Semua Bersama
Ibunda.,
Lihatlah Pangeran Kecilmu Kini Telah Dewasa
Lihatlah Pangeran Kecilmu Kini Telah Strata Dua
Aku Akan Membanggakan Dirimu Lebih Dari ini
Walau Kini Engkau Hanya Tinggal Nama.

“Ibu Nuryanti”

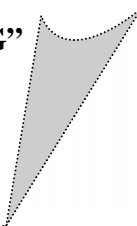
Wanita yang saat ini menemani kami, terimakasih untuk kebaikan dan kasih sayangnya.

“Kakak-Kakak dan Saudraku”

Uwo Nurliana, Engah Zaity Ronitha, Mamah Zurhaida dan Ayah Aguscik serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memotivasi dan mendukungku.

“ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS LAMPUNG”

Yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.



PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan hasil karya yang sederhana
Untuk orang-orang yang berharga dalam hidupku:**

“Ayahanda”

Hi. Malipul Bahri yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi selama ini dengan kasih sayang tulus tanpa pamrih yang diiringi doa restu kepada Allah SWT.

“Almarhumah Ibunda”

Wanita terhebat yang aku sayangi Ayuna Kartini, selalu menjadi semangat dan hadir dalam mimpiku.

“Untuk Ibunda”

Untuk Engkau yang Selalu Ku Cinta,
Untuk Engkau Pengobat Luka
Untuk Engkau yang selalu Ku Rindu,
Tujuh Belas Tahun Kita Bersama
Tujuh Belas Tahun Engkau Membina,
Tujuh Belas Tahun yang Penuh Suka- Cita
Kini Aku Merindukan Masa- Masa itu,
Dimana Kita Semua Bersama
Ibunda.,
Lihatlah Pangeran Kecilmu Kini Telah Dewasa
Lihatlah Pangeran Kecilmu Kini Telah Strata Dua
Aku Akan Membanggakan Dirimu Lebih Dari ini
Walau Kini Engkau Hanya Tinggal Nama.

“Ibu Nuryanti”

Wanita yang saat ini menemani kami, terimakasih untuk kebaikan dan kasih sayangnya.

“Kakak-Kakak dan Saudraku”

Uwo Nurliana, Engah Zaity Ronitha, Mamah Zurhaida dan Ayah Aguscik serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memotivasi dan mendukungku.

“ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS LAMPUNG”

Yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, karunia dan kasih sayang-Nyalah sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Komunitas Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015”** (Studi pada Tokoh **Adat Sai Batin dan Nahdlatul Ulama (NU)**) yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Tesis ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung,
2. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan FISIP Universitas Lampung,
3. Bapak Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, sekaligus Penguji Utama Tesis, terima kasih untuk seluruh saran dan motovasinya selama ini,
4. Bapak Dr. Suwondo, M.A. selaku Koordinator Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, terimakasih atas *Support* dan motivasinya,

5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Utama Tesis, terima kasih atas kesediannya waktunya selama ini dengan sabar memberikan bimbingan, saran, kritik serta motivasi yang membangun agar dapat memberikan yang terbaik dalam proses penyelesaian tesis ini,
6. Bapak Drs. Budi Harjo, M.IP. selaku Pembimbing Pembantu Tesis terima kasih atas semua bimbingan, saran, kritik serta motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini,
7. Seluruh Jajaran Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung,
8. Seluruh Staf Administrasi di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung dan Karyawan TU Fisip Unila yang membantu dan melayani urusan administrasi perkuliahan,
9. Kepada seluruh Informan Penelitian; Putrawan Jaya Ningrat, S.Pd., M.Si. (Ketua Tokoh Adat Sai Batin Pesisir Barat), Marzuki, S.Ag., S.Pd., M.Pd. (Ketua NU Pesisir Barat), Drs. Jon Edwar, M.Pd. (Tokoh Muhammadiyah Pesisir Barat), Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. (Bupati Kab. Pesisir Barat), Erlina, S.P., M.H. (Wakil Bupati Kab. Pesisir Barat), Aria Lukita Budiwan, S.T. (Calon Bupati) Ir. Jamal Naser (Calon Bupati) Prof. Dr. Fauzi Nurdin, M.S. (Tokoh Adat MPAL) Tulus Basuki, S.Pd. (Ketua KPUD Pesisir Barat) Sudarmansyah, S.E (Tokoh Masyarakat Pesisir Barat) dan seluruh Komunitas Politik Kab. Pesisir Barat, terima kasih atas bantuannya yang telah memberikan informasi dan data sehingga tesis ini dapat terselesaikan,
10. Teristimewa kepada orang tuaku, Ayahanda H. Malipul Bahri terimakasih telah menjadi Ayah yang kuat, yang selalu memberikan doa dan motivasi,

yang selalu bekerja keras mendidik untuk menjadikan Penulis menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan nikmat-Nya untuk Ayah. Ibunda Hj. Ayuna Kartini (Almh) terimakasih karena bayanganmu Penulis mampu memotivasi diri, hingga mampu menjalani hidup tanpa dirimu. Ibu Nuryanti, terimakasih telah bersama kami dan memberi semangat hingga saat ini,

11. Kepada Kakakku Nurliana, A.Md dan Zaity Rhonita, A.Md, Ayah Aguscik dan Mama Zurhaida, terima kasih atas segala nasihat serta saran yang memotivasi untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi,
12. Kepada seluruh teman-teman Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) angkatan 2015, Konsentrasi Politik Lokal & Otonomi Daerah, Tata Kelola Pemilu dan Manajemen Pemerintahan. (Putri Rahmaini, S.IP., Natessya S Rahmanda, S.IP., Dita Purnama, S.IP., Habrianda Bukit, S.IP., M. Herowandi, S.IP., Repi Yanto, S.IP., Rangga Giri Wibowo, S.IP., Riri Rianiti, S.IP., Andri Fitriadma, S.T., Adzari Anandito, S.IP., Aris Ali Ridho, S.IP., M. Ikhsan Haqiqi, S.IP., Malka Prima, S.IP., Ryan Yudi Andila, S.A.N., Dhoni Rozitra, S.Kom., Ade Putra, S.E., Jhon Hitler Saragei, S.H., Surya Jaya Rades, S.STP., Septrianingsih, S.A.N., Atek Lis Indriyani, S.E., dkk), terima kasih sudah menjadi keluarga baru dan terima kasih atas kebersamaannya, semoga silaturahmi kita tetap terjaga dengan baik,
13. Sahabat-sahabat dan Saudara-saudaraku, Alam Patria, S.IP., Ikhwan Efrizal, S.IP., Harizon, S.IP., Nazrin Dasit, Virqi Wahyuning Bianti, S.Pi., Sindi Vuliyastri, A.Md. Keb., Aurora Ranim, S.ST., Leni Safitri, S.Pt., serta adik-adik kece Ardi Yanto, Yogi Noviantama, Ahmad Irfan, Lusita Anjelina,

Ega Welly Agustin, A.Md. Keb., Danni Pangaribowo, Nur Kalim, Tri Hendra, Rizko Alfitriyan Y, Restu Aditia P, Yones Sepriyansah, Agung Aditya P, Indra Bangsawan (calon-calon sarjana muda Ilmu Pemerintahan), terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini, semoga silaturahmi kita selalu terjaga dengan baik.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Mei 2017
Penulis,

Ricky Ardian

DAFTAR ISI

Halaman

COVER

ABSTRAK

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR SINGKATAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Komunitas Politik	17
1. Definisi Komunitas	17
2. Ciri-ciri Komunitas	19
3. Politik	20
4. Komunitas Politik	21
B. Tinjauan Tentang Masyarakat Madani (<i>Civil Society</i>).....	22

1. Definisi Masyarakat	22
2. Definisi Masyarakat Madani (<i>Civil Society</i>)	23
3. Ciri-ciri Masyarakat Madani	24
4. Fungsi Masyarakat Madani	26
C. Tinjauan Tentang Peran dan Partisipasi Masyarakat	27
1. Definisi Peran	27
2. Partisipasi Masyarakat	31
3. Partisipasi Politik	32
4. Budaya Politik	35
D. Tinjauan Tentang Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan	40
1. Kelompok Kepentingan	40
2. Kelompok Penekan	43
E. Tinjauan Tentang Perilaku Pemilih	45
1. Perilaku Pemilih	45
2. Tipologi Pemilih	46
3. Teori <i>Vote Buying</i>	46
4. Teori Politik Tradisional	48
F. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah	49
G. Kerangka Pikir	53

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	56
B. Fokus Penelitian	58
C. Lokasi Penelitian	60
D. Informan	61
E. Jenis dan Sumber Data	63
1. Data Primer	63
2. Data Sekunder	63
F. Teknik Pengumpulan Data	63
1. Wawancara	63
2. Dokumentasi	64
G. Teknik Analisis Data	64
H. Teknik Keabsahan Data	64

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung	66
B. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat	67
1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat	67
2. Geografis Kabupaten Pesisir Barat	70
3. Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Barat	73
4. Sosial Budaya Kabupaten Pesisir Barat	75
C. Identitas Informan	78
1. Informan Komunitas Politik Pesisir Barat	78
2. Informan Pemerintah Pesisir Barat dan Calon Bupati	80
3. Informan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Pesisir Barat	81
4. Informan Penyelenggara Pemilu	81

5. Informan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat	81
6. Informan Perwakilan Partai Politik Pesisir Barat.....	82
7. Informan Tokoh Masyarakat Pesisir Barat	82
8. Informan Akademisi/Pengamat Politik	83

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015	84
B. Peran Komunitas Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015	87
1. <i>Symbolic Representatin</i>	92
1.1. Keterwakilan Kultur	93
1.2. Kepercayaan Terhadap Kandidat.....	98
2. <i>Descriptive Representation</i>	101
2.1. Kemiripan Komunitas.....	103
2.2. Keterwakilan <i>Gender</i>	108
3. <i>Substantive Representation</i>	110
3.1. Memperjuangkan Kepentingan Kelompok.....	111
3.2. Memperjuangkan Keterwakilan Kelompok.....	116
C. Faktor-Faktor Komunitas Politik Berperan Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015	129
1. Kesadaran Berpolitik Aktif	130
2. Orientasi Kepentingan.....	133
3. Tujuan Yang Berkelanjutan	136
D. Dampak Peran Komunitas Politik Setelah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat	137
E. Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015	151

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	159
B. Saran	161

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pasangan Calon dan Partai Pendukung Calon	7
Tabel 2. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak di Provinsi Lampung.....	8
Tabel 3. Bentuk-bentuk Partisipasi	35
Tabel 4. Daftar Informan Penelitian.....	62
Tabel 5. Nama, luas wilayah dan jumlah pekon per-kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat.....	74
Tabel 6. Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015.....	85
Tabel 7. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015.....	86
Tabel 8. Daftar Ormas/LSM yang Ber-Badan Hukum, Ber-SKB dan Ber-SKT Kabupaten Pesisir Barat	88
Tabel 9. Nama-Nama Lembaga Adat Kabupaten Pesisir Barat.....	91
Tabel 10. Kegiatan Komunitas Politik Tokoh Adat Sai Batin Dalam Pilkada Pesisir Barat 2015	94
Tabel 11. Kegiatan Komunitas Politik Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Pilkada Pesisir Barat 2015	102
Tabel 12. Kegiatan Komunitas Politik Muhammadiyah Dalam Pilkada Pesisir Barat 2015.....	106
Tabel 13. Peran Komunitas Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015	154

DAFTAR SINGKATAN

- DPR RI	= Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- DPT	= Daftar Pemilih Tetap
- DPTb	= Daftar Pemilih Tambahan
- FKPPi	= Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia
- GEPAK	= Gerakan Pembangunan Anti Korupsi
- GPA	= Gerakan Pemuda Ansor
- KPU	= Komisi Pemilihan Umum
- KPUD	= Komisi Pemilihan Umum Daerah
- KESBANGPOL	= Kesatuan Bangsa dan Politik
- KNPI	= Komite Nasional Pemuda Indonesia
- KUMPAR	= Kumpulan Masyarakat Pesisir Barat
- LSM	= Lembaga Swadaya Masyarakat
- LITA	= Lumbung Informasi Tepat Akurat
- MPAL	= Majelis Penyimbang Adat Lampung
- MPC PP	= Majelis Pengurus Cabang Pemuda Pancasila
- NU	= Nahdlatul Ulama
- PDI-P	= Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- PAN	= Partai Amanat Nasional
- PKB	= Partai Kebangkitan Bangsa
- PBB	= Partai Bulan Bintang
- PKPI	= Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- PD	= Partai Demokrat
- P Nasdem	= Partai Nasional Demokrat
- PSI	= Pejuang Seliwangi Indonesia
- ORMAS	= Organisasi Masyarakat
- SDA	= Sumber Daya Alam
- SKT	= Surat Keterangan Terdaftar
- SKB	= Surat Keterangan Bersama
- SKPD	= Satuan Kerja Perangkat Daerah
- PWRI	= Persatuan Wredatama Republik Indonesia
- PPPKPB	= Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat
- PANWASLU	= Panitia Pengawas Pemilihan Umum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan langsung kepala daerah menjadi konsensus politik nasional, yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, hingga saat ini telah diamandemen menjadi Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis.

Pasangan calon ini diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan. Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD yang dipertanggungjawabkan kepada DPRD dalam pelaksanaannya. Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan bahwa warga yang memiliki hak memilih pada pasal 56 adalah warga yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, dan

harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bagi warga yang tidak terdaftar dapat menggunakan KPT sebagai daftar pemilih tambahan (DPTb). Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa partisipasi memilih merupakan hak bukan suatu kewajiban. Di beberapa negara, partisipasi diposisikan sebagai suatu kewajiban, contohnya di Australia, di Indonesia partisipasi merupakan hak warga negara, baik hak memilih maupun tidak memilih.

Namun demikian, pemerintah melalui KPU terus berupaya dengan berbagai bentuk sosialisasi meningkatkan partisipasi memilih. Jika sebelumnya pilkada dilakukan secara tidak serentak, namun pada tahun 2015 pilkada dilakukan secara serentak. Provinsi Lampung telah melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2015 di delapan kabupaten/kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Way Kanan, Lampung Timur, Pesawaran dan Kabupaten Pesisir Barat.

Satu-satunya kabupaten di Lampung yang pertama kali melaksanakan pemilihan kepala daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Pesisir Barat resmi menjadi sebuah kabupaten baru pada tanggal 22 April 2013 dengan Ibukota Krui. Kabupaten Pesisir Barat memiliki 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Pesisir Tengah, Way Krui, Krui Selatan, Karya Penggawa, Pesisir Utara, Lemong, Pesisir Selatan, Ngambur, Bengkunt, Bengkunt Belimbing dan Kecamatan Pulau Pisang.

Pendirian Kabupaten Pesisir Barat merupakan aspirasi dari seluruh masyarakat setempat, karena sebelumnya masyarakat Pesisir Barat merasa pendapatan daerah yang dihasilkan tidak sebanding dengan kesejahteraan warga di wilayahnya yaitu Lampung Barat sebagai kabupaten induk. Tidak maksimalnya perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terhadap masyarakat yang ada di daerah Krui dianggap menjadi penyebab utama. Salah satu contoh tidak maksimalnya perhatian pemerintah tersebut yaitu dalam pelayanan publik, seperti dalam mengurus surat-menyurat (surat tanah, surat izin usaha, bayar pajak kendaraan dan lain sebagainya). Hal ini menjadi masalah utama dalam mengurus proses surat-menyurat tersebut, karena jarak tempuh yang cukup jauh dari Krui menuju Liwa sebagai ibukota Lampung Barat.

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat mulai dirintis sejak tahun 2005. Para tokoh masyarakat di daerah ini, pada tanggal 20 Februari membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat (P3KPB). Panitia terbagi dalam tiga kelompok wilayah kerja kepantiaan yaitu: wilayah kerja panitia persiapan di tingkat kabupaten induk (Kabupaten Lampung Barat) yang berpusat kedudukan di Krui, wilayah kerja panitia persiapan di tingkat Provinsi Lampung yang berkedudukan di Bandar Lampung, dan wilayah kerja panitia persiapan di tingkat pusat yang berkedudukan di Jakarta.

Terbentuknya kabupaten tersebut tentu banyak dukungan dari masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu Tokoh Masyarakat Pesisir Barat berikut:

Proses pemekaran Kabupaten Pesisir Barat sebenarnya cukup rumit dan sedikit terlambat, karena beberapa hal yang menjadi masalah seperti kekompakan antara panitia persiapan pembentukan Kabupaten Pesisir Barat dengan kabupaten induk yaitu Lampung Barat, belum lagi terkendala rumitnya izin dan persetujuan dari DPR RI. Namun dukungan terus mengalir dari masyarakat meskipun sulit tapi tetap optimis. Pada umumnya masyarakat mendukung sepenuhnya Krui menjadi kabupaten agar tidak susah lagi dalam mengurus segala yang dibutuhkan masyarakat umumnya.¹

Keterlibatan setiap unsur masyarakat memiliki beberapa indikator, salah satu indikator tersebut adalah adanya komunitas politik. Komunitas politik merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan atau budaya yang sama dan tinggal dalam suatu wilayah, seperti halnya komunitas politik yang maksud adalah tokoh adat Sai Batin yang ada di Pesisir Barat yang tergabung dalam Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL). Selain tokoh adat Sai Batin, komunitas politik yang lain, diantaranya secara formal yaitu Ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Keterlibatan komunitas politik tokoh adat Sai Batin dapat dilihat secara nyata yang dalam penjelasannya tokoh adat dan tokoh masyarakat menginginkan pemekaran karena Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi yang cukup menjanjikan dan dianggap mampu bersaing dengan daerah lain, seperti potensi sumber daya alam yang ada di Pesisir Barat, potensi tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

¹ Hasil wawancara dengan Sudarmansyah, mantan DPRD Lambar/Tokoh Masyarakat Pesisir Barat, pada hari senin 12 September 2016, pukul: 10.30 wib.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua Majelis Penyimbang² Adat³

Lampung (MPAL) Pesisir Barat Putrawan Jaya Ningrat, bahwa:

Kita semua tentu sangat bangga adanya wujud Kabupaten Pesisir Barat, karena perjuangan yang cukup sulit untuk menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sudah ada sejak tahun 1970, tahun 2000 dan tahun 2005. Kita terus ikut dalam musyawarah dan diskusi bersama panitia pemekaran. Sehingga dengan perjuangan yang cukup maksimal kabupaten ini akhirnya terbentuk pada tanggal 25 oktober 2012.⁴

Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa pemekaran Kabupaten Pesisir Barat tidak terlepas dari dukungan dan keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini tentu komunitas politik Sai Batin yang tergabung dalam Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) cukup berperan dalam pemekaran tersebut. Adapun nama-nama tokoh adat Sai Batin Pesisir Barat, yaitu: Marga Malaya, Marga Pugung Marga Tampak, Marga Pugung Penengahan, Marga Pulau Pisang, Marga Waysindi, Marga Laay, Marga Bandar, Marga Pedada, Marga Ulu Krui, Marga Pasar Krui, Marga Way Napal, Marga Tenumbang, Marga Ngambur, Marga Ngaras, Marga Bengkumat, Marga Belimbing.

Berdasarkan uraian latar belakang proses pemekaran Pesisir Barat di atas, tokoh adat Sai Batin marga Pesisir Barat tentunya memiliki andil yang cukup besar dalam pemekaran tersebut. Namun tidak hanya dalam proses pemekaran, hal tersebut terlihat juga pada saat pemilihan kepala daerah

² Penyimbang adalah tokoh yang dituakan dalam sebuah marga, sebutan lain dari keluarga. Secara sosial, marga mengacu pada sekelompok orang yang berasal dari satu keluarga besar.

³ Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.

⁴ Hasil wawancara dengan Ketua MPAL Pesisir Barat, ketua para Sai Batin marga Krui, pada minggu 11 september 2016, pukul 15.35 wib).

beberapa waktu lalu, dimana para tokoh adat juga ikut sosialisasi dalam proses pilkada, seperti yang tertuang dalam harian Lampung.com, yaitu:

Sebanyak 16 Sai Batin (tokoh adat) Kabupaten Pesisir Barat yang tergabung dalam Majelis Punyimbang Adat Lampung (MPAL) menggelar sosialisasi publik guna menciptakan pilkada yang jujur dan adil. Sosialisasi berlangsung pada Jumat menjelang pilkada di Lamban Gedung Marga Way Napal, Pekon Way Napal, Kecamatan Krui Selatan. KPU Pesisir Barat yang didampingi KPU Lampung Barat tampil sebagai narasumber dalam sosialisasi itu. Sai Batin Marga Way Napal, Putrawan menyatakan KPU Pesisir Barat harus berkomitmen menjaga pilkada pertama di daerah ini berlangsung adil dan jujur.⁵

Upaya yang dilakukan oleh komunitas politik (tokoh adat Sai Batin Pesisir Barat) dalam proses pemilihan kepala daerah terlihat jelas seperti yang dijelaskan di atas, selain ikut sosialisasi tokoh adat ini juga ikut serta mengawasi pada saat proses pilkada dengan meninjau langsung lokasi pemungutan suara hingga penghitungan suara. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan pada masyarakat umumnya.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa peran komunitas politik, baik dalam proses pemekaran ataupun pemilihan kepala daerah menjadi salah satu pra-syarat terwujudnya otonomi daerah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Terwujudnya otonomi daerah tersebut, menjadikan secara langsung pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan seluruh elemen masyarakat memiliki aspirasi untuk mewujudkan Pesisir Barat sejahtera dan mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah lain.

⁵ Harianlampung.com. [Harian%20Lampung%20-%20Politik%20\)%202016%20Saibatin%20Pesisir%20Barat%20Sosialisasi%20Pilkada.htm](http://Harian%20Lampung%20-%20Politik%20)%202016%20Saibatin%20Pesisir%20Barat%20Sosialisasi%20Pilkada.htm) (diakses pada rabu 14 september 2016, pukul 11.00 wib).

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015 merupakan pemilihan langsung yang pertama kalinya bagi masyarakat Pesisir Barat dalam memilih calon kepala daerah. Pemilihan kepala daerah yang melibatkan masyarakat secara langsung ini telah dilaksanakan pada beberapa waktu lalu yaitu pada tanggal 9 Desember 2015 dan diikuti empat pasang calon, seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pasangan Calon dan Partai Pengusung Calon

No	Pasangan calon kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat 2015	Partai pengusung calon kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat 2015
1	Agus Istiqlal - Erlina	NasDem, PKB dan PAN
2	Aria Lukita Budiman - Evan Tolani	Demokrat, PKS dan PBB
3	Jamal Naser - Syahrial	Perseorangan/ independen
4	Oking Ganda Miharja- Irawan Topani	PDI-P dan PKPI

(Sumber : KPUD Pesisir Barat 2015).

Selain komunitas politik, masyarakat Pesisir Barat juga memiliki peran besar dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih, karena salah satu yang menentukan keberhasilan pilkada adalah tingkat partisipasi masyarakatnya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015 adalah sebesar 76,84 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak di Provinsi Lampung.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Memilih	% Partisipasi
1	Metro	112.372	86.744	77,19
2	Pesisir Barat	104.647	80.407	76,84
3	Pesawaran	334.288	234.245	70,07
4	Way Kanan	333.639	231.710	69,45
5	Lampung Selatan	731.291	496.901	67,95
6	Bandar Lampung	632.079	418.916	66,28
7	Lampung Tengah	961.970	624.795	64,95
8	Lampung Timur	794.576	505.225	63,17
Rata-Rata Tingkat Partisipasi				69,52

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)).

Berdasarkan data pada tabel 2, menginformasikan bahwa partisipasi tertinggi terdapat di Kota Metro 77,19% dan Kabupaten Pesisir Barat dengan capaian 76,84%. Sedangkan partisipasi terendah terjadi di Kabupaten Lampung Timur hanya sebesar 63,17%. Dengan jumlah tingkat partisipasi terbanyak ke-2 pilkada Pesisir Barat tentu menjadi hal yang cukup menarik untuk dikaji, *pertama*, apakah komunitas politik memiliki peran untuk tercapainya tingkat partisipasi yang besar, mengingat kabupaten ini baru pertama kali melaksanakan pemilihan kepala daerah. *kedua*, jika demikian, lalu apa saja yang dilakukan komunitas politik ini dalam meningkatkan partisipasi politik.

Selain komunitas politik Sai Batin yang tergabung dalam MPAL di atas, penulis juga berpendapat berdasarkan pra-riset bahwa secara formal komunitas politik yang ikut berperan dalam pilkada Pesisir Barat adalah ormas islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Keterlibatan ormas islam ini terlihat pada saat pelaksanaan pilkada bahkan bagian dari ormas islam ini

yaitu Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) turut serta menjadi tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, karena salah satu calon wakil bupati berasal dari Nahdlatul Ulama (NU).

Berdasarkan hasil Pra-riset, dapat disebutkan komunitas politik yang ada di Pesisir Barat diantaranya:

1. Tokoh Adat Sai Batin Marga Pesisir yang tergabung dalam MPAL
2. Nahdlatul Ulama (NU),
3. Ormas Muhammadiyah,
4. Ormas Pemuda Pancasila (PP),
5. Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI),
6. Pejuang Siliwangi Indonesia (PSI),
7. LSM Kumpulan Masyarakat Pesisir Barat (Kumpar),
8. Gerakan Pemuda (GP) Ansor,
9. LSM Lumbung Informasi Tepat Akurat (LITA).

Namun, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah komunitas politik Tokoh Adat Sai Batin dan Nahdlatul Ulama (NU), dikarenakan dua komunitas ini memiliki relasi atau hubungan yang cukup besar perannya dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat, seperti yang dijelaskan di atas bahwa salah satu calon wakil bupati merupakan kader NU, sehingga hal ini secara tidak langsung memiliki peran yang besar. Selain NU, yaitu Tokoh Adat Sai Batin juga memiliki peran karena salah satu calon merupakan tokoh masyarakat yang memiliki kedekatan yang cukup baik dengan tokoh adat tersebut.

Peran komunitas politik dalam pemilihan kepala daerah tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan organisasi masyarakat (Ormas), dikarenakan ada relasi atau hubungan yang terjalin antara kedua belah pihak baik antara calon dengan ormas atau sebaliknya. Hal ini terlihat dari hasil riset yang dilakukan oleh

Putu Indah Prameswari⁶ dalam jurnalnya yang berjudul “Studi Kasus Tentang Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013”, mengungkapkan bahwa:

“Keterlibatan organisasi masyarakat Laskar Bali dalam Pilgub Bali 2013 dikarenakan adanya relasi atau hubungan yang terjalin antara pengurus Laskar Bali dengan salah satu kandidat. Hubungan yang terjalin diantara organisasi masyarakat Laskar Bali dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan di Bali merupakan sebuah hubungan *symbiosis mutualisme*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laskar Bali memilih untuk mensukseskan salah satu kandidat berdasarkan keputusan bersama dikarenakan adanya kedekatan antara Sekjen Laskar Bali dengan salah satu kandidat Pilgub Bali 2013. Kepentingan yang dimiliki Laskar Bali adalah untuk mendapatkan akses dan kedudukan di dalam Pemerintahan Bali”.

Berdasarkan hasil riset tersebut, menginformasikan bahwa keterlibatan ormas Laskar Bali lebih memilih untuk mensukseskan salah satu pasang calon berdasarkan kesepakatan atau keputusan bersama karena adanya kedekatan antara ormas tersebut dengan salah satu kandidat Pilgub Bali. Namun dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis lebih memfokuskan pada peran komunitas politik (Tokoh Adat Sai Batin dan Nahdlatul Ulama (NU)) dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015.

Selain itu, hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut karena Kabupaten Pesisir Barat merupakan pertama kalinya melaksanakan pilkada dan pada tahap perhitungan suara memiliki selisih suara yang cukup mengejutkan yaitu hanya selisih 1.069 suara dari pasangan nomor urut 1 Agus Istiqlal-Erlina dan nomor urut 2 Aria Lukita-Evan Tolani. Bahkan karena kecilnya

⁶ Jurnal, Putu Indah Prameswari. *Studi Kasus Tentang Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013*. (dalam Jurnal Politik Muda, Vol. 4 No. 1, Januari - Maret 2015, 137 – 143).

selisih suara tersebut ada indikasi kampanye hitam serta dugaan temuan politik uang yang dilakukan pasangan Agus Istiqlal-Erlina membuat pasangan Aria Lukita-Evan Tolani mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga penelitian ini perlu dilanjutkan untuk menemukan bagaimana peran komunitas politik dalam pilkada Pesisir Barat 2015.

Namun dalam penelitian ini penulis juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu referensi, dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

1. Amrianto, “Peranan Elit Tradisional Dalam Dinamika Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi 2014”.⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam bidang ekonomi, adanya hubungan ketergantungan antara masyarakat (massa) dengan bangsawan Wakatobi. Dalam bidang politik, pilihan politik bangsawan Wakatobi di tempatkan sebagai tokoh, dimana keputusan politik akan selalu di patuhi dan tidak berani dilanggar. Bidang sosial, posisi sosial (kedudukan) akan berpengaruh kepada masyarakat. Dalam bidang psikologis, adanya hubungan emosional antara bangsawan Wakatobi dengan masyarakat dan mengarah kepada kesetiaan pada bangsawan Wakatobi yang tentunya tidak didasarkan pada rasionalitas.

Penelitian di atas mengungkapkan bahwa adanya ketergantungan masyarakat dengan bangsawan dalam bidang ekonomi mengenai dinamika politik lokal. Pada bidang politik, pilihan politik bangsawan Wakatobi di tempatkan sebagai tokoh, keputusan politik akan selalu dipatuhi dan tidak berani

⁷ Skripsi, Amrianto, *Peranan Elit Tradisional Dalam Dinamika Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi 2014*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fiisp Unsrat, hal 14.

dilanggar, begitu pula pada bidang sosial dan psikologi adanya rasa memelihara kesetiaan antara bangswan dan adat setempat. Jika dikaitkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan tentu ada sedikit perbedaan, penelitian sebelumnya di atas memfokuskan pada dinamika politik lokal pemilihan kepala daerah. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada bagaimana peran komunitas politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015.

2. Amin Mudzakkir, "Revivalisme Masyarakat Adat Dalam Politik Lokal Di Indonesia Pasca-Soeharto: Studi Kasus Komunitas Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat ". Hasil penelitian ini menguraikan bahwa revivalisme adat dalam kasus komunitas Kampung Naga terbentuk oleh adanya perjumpaan atau interaksi antara mereka dengan pihak pemerintah. Selain itu, kehadiran para turis dan aktivis LSM, selain juga kalangan wartawan dan peneliti, turut juga menyumbang pengaruh dalam pembentukan kesadaran revivalis tersebut.⁸

Hasil penelitian Amin Mudzakkir di atas menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat adat dalam politik lokal cukup dominan dengan adanya kerja sama atau interaksi antara masyarakat adat dengan pemerintah setempat. Sehingga dengan interaksi tersebut memiliki makna yang luas tidak hanya sebagai ritus tradisional, akan tetapi juga sebagai kekuatan dalam memperjuangkan kepentingan mereka didepan pemerintah. Namun dalam

⁸ Jurnal, Amin Mudzakkir. *Revivalisme Masyarakat Adat Dalam Politik Lokal Di Indonesia Pasca-Soeharto: Studi Kasus Komunitas Kampung Naga*, Tasikmalaya, Jawa Barat, hal 12-13. 2011.

penelitian ini penulis lebih menekankan pada bagaimana peran komunitas politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat 2015.

3. I Gusti Ayu Oka Pramitha Dewi, “Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Demokratis”⁹. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi rakyat dalam pemerintahan demokratis sebagai syarat utama dalam menjalankan pemerintahan yang berdasarkan kepentingan rakyat. Demokrasi dapat menumbuhkan perasaan memiliki bagi masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan sesuai dengan makna demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Proses pelaksanaan program dan pelaksanaan pembangunan dalam demokrasi pemerintahan daerah yang berlandaskan peran masyarakat meliputi perencanaan dan pelaksanaan program, dialog dengan publik dan pengambilan keputusan.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa proses yang dilakukan masyarakat yakni dengan ikut serta dalam pelaksanaan program dan pembangunan pemerintah daerah dengan cara dialog dan ikut serta mengambli keputusan secara bersamaan. Akan tetapi dalam hal ini penulis tidak memfokuskan tentang penyelenggara pemerintahannya, melainkan pada pemilihan kepala daerah. Ketiga uraian penelitian terdahulu di atas menjadi salah satu referensi penulis dalam menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

⁹ Skripsi, *Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis* Bagian Hukum Pemerintah Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal 5.

4. Indra Purbono Ishak, “Peta Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010”¹⁰. Indra Purbono Ishak mengatakan bahwa di dalam penyelenggaraan pilkada tidak bisa dipungkiri terdapat peran dari beberapa individu, organisasi atau kelompok yang ikut serta nantinya dalam pelaksanaan pilkada Tana Toraja 2010. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam proses pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Tana Toraja, para kandidat didukung oleh kekuatan-kekuatan politik tingkat lokal. Kekuatan politik itu terbagi atas: Partai Politik, Tokoh Masyarakat Media Massa dan Birokrat. Adanya patronase elit lokal yang berpengaruh dan terlibat dalam pemilihan Kepala daerah di kabupaten Tana Toraja ternyata mengambil peranan dan pengaruh yang sangat penting,. Secara praktiknya, dalam sirkulasi elit di Kabupaten Tana Toraja elit yang memegang peranan lebih dominan adalah partai politik, karena mampu mewakili seluruh kekuatan politik yang ada.

5. Syaiful Huda, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”.¹¹ Berdasarkan hasil penelitian Syaifu Huda menyimpulkan bahwa respon masyarakat Desa Tegalrejo dalam pilkada Kabupaten Pati 2012 cenderung menerima hadirnya *money politic*. Meskipun demikian, mereka tetap mau berpartisipasi jika tidak ada *money politic*, hanya saja jika diberi uang mereka akan menerimanya. Faktor yang mempengaruhi adalah hubungan

¹⁰ Skripsi, Indra Purbono Ishak. *Peta Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010*, Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2012, hal 98-99.

¹¹ Skripsi, Syaiful Huda. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suna Kalijaga Yogyakarta, hal 34-35.

masyarakat dengan calon (4%), *money politic* (76%), kondisi sosial ekonomi (16%) dan faktor sosial politik (4%).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indra Purbono Ishak mengenai Peta Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010 dan Syaiful Huda tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati merupakan dua hal yang berbeda namun tetap dalam lingkup daerah dan pemilihan kepala daerah. Jika Indra menjelaskan tentang kekuatan peta politik yaitu Partai Politik, Tokoh Masyarakat Media Massa dan Birokrat. Adanya patronase elit lokal yang berpengaruh dan terlibat dalam pemilihan Kepala daerah. Sedangkan Syaiful Huda lebih menitikberatkan pada pengaruh *money politic* dalam pilkada.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana peran komunitas politik (Sai Batin dan NU) dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015, dengan melihat apa saja yang dilakukan komunitas politik tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran komunitas politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015 ?
2. Mengapa Komunitas Politik ikut berperan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015 ?
3. Apa dampak Peran Komunitas Politik tersebut setelah pilkada ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana komunitas politik di Pesisir Barat ikut berperan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015.
2. Untuk mengetahui mengapa komunitas politik berperan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015.
3. Untuk mengetahui dampak peran komunitas politik setelah pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pemerintahan dan politik serta dapat memperluas daya berpikir salah satu referensi, khususnya mengenai komunitas politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan sumbangan pemikiran serta memberikan inspirasi terkait mengenai komunitas politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka terdiri dari teori dan konsep yang dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Meliputi tinjauan tentang Komunitas Politik, Masyarakat Madani (*civil society*), Peran, Partisipasi Politik, Budaya Politik, Kelompok Kepentingan serta Kelompok Penekan, Perilaku Pemilih, *Vote Buying*, Politik Transaksional dan Pemilihan Kepala Daerah.

A. Tinjauan Tentang Komunitas Politik

1. Definisi Komunitas

Membahas tentang komunitas tentunya tidak bisa dipisahkan dari kelompok sosial pada umumnya, sebagaimana kelompok sosial adalah¹ sebuah naluri manusia sejak ia dilahirkan. Naluri ini yang selalu mendorongnya untuk selalu menyatukan hidupnya dengan orang lain dalam kelompoknya. Naluri berkelompok itu juga yang mendorong manusia untuk menyatukan dirinya dengan kelompok yang lebih besar dalam kehidupan manusia lain disekelilingnya bahkan mendorong manusia menyatu dengan alam fisiknya. Untuk memenuhi naluriah manusia ini, maka setiap manusia setiap melakukan proses keterlibatannya dengan orang lain dan lingkungannya, proses ini dinamakan adaptasi. Adaptasi

¹ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 48

dengan kedua lingkungan tadi; manusia lain dan alam sekitarnya itu, melahirkan struktur sosial baru yang disebut dengan kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relatif kecil yang hidup secara guyub.

Community berasal dari bahasa Latin yang artinya komunitas. Komunitas² adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumberdaya, preferensi, kebutuhan, resiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa komunitas dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang saling berinteraksi, yang tinggal dalam wilayah yang sama dan memiliki kebudayaan yang sama.

Burhan Bungin (2009: 83) mengemukakan bahwa:

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumberdaya, preferensi, kebutuhan, resiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.³

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya Komunitas, antara lain sebagai berikut:

² Ibid hlm 83.

³ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 83.

1. Adanya suatu interaksi yang lebih besar diantara anggota yang bertempat tinggal disatu daerah dengan batas-batas tertentu.
2. Adanya norma sosial manusia didalam masyarakat, diantaranya kebudayaan masyarakat sebagai suatu ketergantungan yang normatif, norma kemasyarakatan yang historis, perbedaan sosial budaya antara lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat.
3. Adanya ketergantungan antara kebudayaan dan masyarakat yang bersifat normatif. Demikian juga norma yang ada dalam masyarakat akan memberikan batas-batas kelakuan pada anggotanya dan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi kelompok untuk menyumbangkan sikap dan kebersamaannya dimana mereka berada.

2. Ciri-Ciri Komunitas

a) Kesatuan Hidup yang Tetap dan Teratur

Sebagai suatu kelompok sosial, komunitas merupakan kesatuan hidup manusia yang tetap dan teratur. Hubungan antaranggotanya berlangsung secara akrab, kekeluargaan, saling mengenal (*face to face*), saling menolong.

b) Bersifat Teritorial

Unsur utama dan khas yang menunjukkan suatu kelompok sosial sebagai komunitas sosial adalah daerah yang sama tempat kelompok tersebut berada. Oleh karena itu, komunitas sering disebut masyarakat setempat. Contohnya, kelompok sosial yang bertempat tinggal di

lingkungan RT, RW, desa. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam komunitas tidak mengandung pengertian regionalisme atau daerah yang luas seperti kabupaten atau provinsi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komunitas merupakan suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah nyata dan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat serta terikat oleh suatu rasa identitas dalam komunitas. Komunitas juga merupakan sekelompok individu yang tinggal pada wilayah tertentu, memiliki nilai-nilai keyakinan dan minat yang relatif sama, serta adanya interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan.

3. Politik

Politik merupakan seni proses membentuk dan membagi-bagi kekuasaan melalui pengambilan keputusan. Politik berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat atau kehidupan bernegara. Untuk mewujudkan kebaikan bersama, masyarakat membutuhkan politik. Politik digunakan dalam penyelenggaraan masyarakat (negara) dengan tujuan mendapatkan dan mempertahankan tahta dan membuat kebijakan publik.

Pengertian politik pada umumnya politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang terjadi menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Untuk

melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum yang menyangkut peraturan dan pembagian atau alokasi dari sumber sumber yang ada.

4. Komunitas Politik

Masyarakat memiliki ciri bahwa mereka tinggal dalam wilayah geografis yang sama, saling berhubungan dan berinteraksi dan memiliki kebudayaan serta terikat pada kelompok yang sama. Sedangkan komunitas merupakan bagian atau kumpulan dari masyarakat yang berkelompok yang saling berinteraksi, yang tinggal di wilayah sama dan memiliki kebudayaan yang sama. Suatu masyarakat politik tidak mungkin muncul begitu saja, mengingat di dalamnya tercakup gagasan mengenai peranan dan sifat individu serta hubungan dengan sesamanya juga dengan pemerintahannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa komunitas politik itu muncul dalam masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok yang berbeda latar belakang untuk hidup secara rukun sebagai sebuah komunitas.

Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa komunitas politik adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan tujuan. Dalam hal ini tokoh Adat Sai Batin Pesisir Barat yang tergabung dalam MPAL masuk dalam kategori komunitas politik karena tokoh Adat Sai Batin merupakan sekelompok orang yang memiliki kepedulian yang besar dalam mewakili harapan dan keinginan masyarakat, terlebih dalam

sistem kultur atau budaya yang ada di Pesisir Barat umumnya. Ketokohan Sai Batin dalam masyarakat merupakan representasi atau perwakilan kepentingan masyarakat itu sendiri, maka dari itu sesuai yang dikemukakan bahwa tokoh Sai Batin ialah orang yang dianggap sebagai perwujudan dari masyarakat itu sendiri.

Namun dalam penelitian ini juga penulis mencantumkan komunitas politik yang lain yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Salah satu Ormas Islam merupakan komunitas politik yang secara formal memang selalu terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah, baik sebagai pendukung salah satu calon maupun jadi salah satu ikut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Seperti halnya Nahdlatul Ulama (NU) yang ada di Pesisir Barat, secara kasat mata ikut serta dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat 2015, bahkan menjadi pendukung salah satu kandidat, karena salah satu calon wakil bupatinya adalah kader Nahdlatul Ulama (NU). Maka secara nyata dukungan tersebut tentu cukup berpengaruh, seperti keterlibatan yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor).

B. Tinjauan Tentang Masyarakat Madani (*Civil Society*)

1. Definisi Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan

sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit, masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya teritorial, bangsa, golongan dan lain sebagainya.

Menurut Auguste Comte (Abdulsyani, 2007: 31), bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya⁴. Jadi secara umum masyarakat merupakan sekelompok manusia yang memiliki tatanan kehidupan, norma dan nilai serta adat-istiadat yang memiliki tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Masyarakat dalam kegiatannya sering berkelompok dan menghargai satu sama lain. Toleransi antar manusia sangat tinggi, artinya masyarakat sangat berbudaya.

2. Definisi Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Sebagai sebuah konsep, *civil society* datang dari pemikiran ilmuwan eropa (Barat). Proses demokratisasi yang lebih dulu berlangsung di Barat telah menjadikan *civil society* bagian penting dari kehidupan sosial, politik, ekonomi, serta kebudayaan mereka. Terutama dalam meretas peradaban yang dibangunnya. Bagi mereka, kehidupan negara dan bangsa yang ideal itu terwujud dengan memberikan peran lewat pola *bottom-up* yang

⁴ Abdulsyani. 2007. *Sosiologi: Sistemika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm.31.

lebih kuat pada masyarakat. Seiring dengan hembusan demokrasi yang kian menguat, konsep ini terus berlanjut dan menguat di berbagai belahan bumi lainnya.

Pada dasarnya tujuan dari *civil society* akan mengerucut pada upaya pemberdayaan (*empowerment*) sekaligus revitalisasi (*enrichment*) kemerdekaan masyarakat sipil, dalam melakukan kontrol terhadap negara secara sukarela, mandiri dan tetap terikat pada norma dan nilai hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, urusan *civil society* tidak dapat dilepaskan dari faktor historis, kearifan budaya, serta tingkat “penetrasi” penguasa politik negara ke masyarakat. Faktor-faktor ini telah menyebabkan terjadi “pasang-surutnya” gerakan *civil society* di Indonesia.

3. Ciri-ciri Masyarakat Madani (*Civil Society*)

- a. Menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh iman dan teknologi.
- b. Mempunyai peradaban yang tinggi (beradab).
- c. Mengedepankan kesederajatan dan transparansi (keterbukaan).
- d. Demokratisasi.

Dalam kerangka ini hanya negara demokratis yang mampu menjamin masyarakat madani. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi : 1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 2) Pers yang bebas 3) Supremasi hukum 4) Perguruan Tinggi 5) Partai politik.

e. Toleransi.

Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat yang lain yang berbeda.

f. *Free public sphere* (ruang publik yang bebas)

Ruang publik yang diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.

Jadi secara umum *civil society* merupakan sebuah tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang berlaku dengan suatu tujuan dan kebudayaan yang, serta memiliki ruang publik yang bebas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Siti Hidajatul Hidajah (2004:70),⁵ bahwa dalam sebuah ruang politik, *civil society* merupakan suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku,

⁵ Hidajah, Siti Hidajatul. 2004. *Birokrasi dan Pembentukan Civil Society: Analisis Peran dan Fungsi Birokrasi di Indonesia*. Pukad- Hali, hlm. 70.

tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material dan tidak terserah di dalam jaringan kelembagaan politik resmi.

4. Fungsi Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Adapun fungsi masyarakat madani dalam sebuah negara dapat dideskripsikan sebagai berikut, yaitu:

- a. Meniadakan ketidakadilan dan kesenjangan dalam masyarakat.
- b. Melindungi kepentingan penduduk yang universal.

Kepentingan tersebut meliputi elemen sipil, politik dan social. Jadi secara umum fungsi masyarakat madani yaitu membantu sesama tanpa pandang bulu, melindungi kepentingan penduduk yang secara menyeluruh. Terlihat jelas bahwa masyarakat madani memiliki fungsi yang mengikat. Artinya memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitar.

Berdasarkan definisi masyarakat madani (*civil society*) di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah ranah politik peran serta *civil society* menjadi syarat utama suksesnya kegiatan politik seperti halnya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Sebagaimana pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat beberapa waktu lalu, tingginya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mengukuhkan pilkada tersebut. Lebih khusus peran tokoh adat Sai Batin yang ada di Pesisir Barat juga cukup diperhitungkan keberadaannya. Selain itu secara formalpun peran tersebut juga terlihat dengan adanya ormas islam Nahdlatul Ulama (NU).

C. Tinjauan Tentang Peran dan Partisipasi Masyarakat

1. Definisi Peran

Definisi peran menurut Soerjono Soekanto,⁶ peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.⁷ Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti

⁶ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002, hlm 243.

⁷ Thoah, Miftah. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. 1997 hlm. 56.

ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Menurut Soerjono Soekanto (2002 : 441)⁸, unsur-unsur peranan atau role adalah:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan.
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban.
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan.
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu⁹:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

⁸ Ibid hlm. 441.

⁹ Ibid hlm. 426.

Berdasarkan definisi peran tersebut menerangkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam segala kegiatan politik seperti pemilihan kepala daerah menjadi salah satu syarat suksesnya pilkada. Namun dalam proses transisi politik di berbagai daerah terjadi reduksi terhadap konsepsi demokratisasi semata-mata sebagai penguatan *political society* melalui representasi politik.

Hannah Pitkin (1967) dalam R. Siti Zuhro (2009: 20)¹⁰ menyebutkan empat wajah representasi politik, yaitu *Formalistic, Symbolic, Descriptive dan Substantive Representations*. Namun dalam penjelasannya selain konsep *formalistic*, menekankan pada tiga wajah representasi alternatif, yaitu:

1. *Symbolic Representation*, bisa dilihat dalam keterwakilan kultur, kepercayaan dan identifikasi. Isu utamanya adalah bagaimana seorang kandidat dapat diterima dan dapat mewakili kelompoknya. Tingkat representasi atau keterwakilannya dapat dilihat sebagai tingkat penerimaan dari orang atau kelompok yang diwakilinya.
2. *Descriptive Representation*, adalah tingkat kemiripan antara yang mewakili dan yang diwakili. Kemiripan tersebut meliputi kesamaan basis kewilayahan, komunitas, kelompok dan *gender*.
3. *Substantive Representation*, adalah aktivitas untuk memperjuangkan kepentingan yang direpresentasikan dalam ranah publik. Tingkat

¹⁰ R. Zuhro, Siti. 2009. *Demokrasi Lokal: Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. Yogyakarta. Hlm 20.

keterwakilannya dapat dilihat dari sejauhmana kemampuan seorang wakil tersebut memperjuangkan kepentingan yang diwakilinya.

Dalam konsep representasi politik tersebut, aktor-aktor yang bisa menjadi mediator (intermediasi) diperluas, tidak hanya mencakup masyarakat politik, seperti partai politik, tetapi juga mencakup kelompok atau institusi yang mengemban fungsi *intermediary*. Dengan demikian, representasi bisa menggunakan berbagai jalur: pertama, secara langsung (*self representation /direct participation*), kedua, melalui mediator seperti *civil society* (*NGOs, civil expert, media massa*), *political society* (partai politik, kelompok kepentingan /penekan, lobby) dan *informal leaders* seperti patron dan pemimpin komunitas.¹¹

Berdasarkan penjelasan teori peran dan representasi di atas, penulis memiliki pandangan bahwa komunitas politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat termasuk dalam konsep representasi politik. Dalam hal ini dapat dilihat dari representasi alternatif (*Symbolic Representation, Descriptive Representation dan Substantive Representation*). *Symbolic Representation*, dapat dilihat dalam keterwakilan kultur, kepercayaan dan identifikasi.

Keterwakilan yang dimaksud adalah Komunitas politik tokoh adat Sai Batin Pesisir Barat, yang menjadi bagian dari masyarakat dan dipercaya menjadi panutan atau tuntunan, sehingga dapat memberi pengaruh kepada khalayak dalam pemilihan kepala daerah Pesisir Barat 2015. *Descriptive*

¹¹ Ibid 20.

Representation, seperti penjelasan di atas bahwa adanya tingkat kemiripan antara yang mewakili dan yang diwakili meliputi kesamaan basis kewilayahan, komunitas, kelompok dan *gender*. Dalam hal ini tentunya komunitas politik selain tokoh adat Sai Batin juga komunitas politik Nahdlatul Ulama (NU) yang berperan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat 2015.

Sedangkan *Substantive Representation*, adalah aktivitas untuk memperjuangkan kepentingan yang direpresentasikan dalam ranah publik. Dalam hal ini komunitas politik tokoh adat Sai Batin Nahdlatul Ulama (NU) Pesisir Barat sama-sama memperjuangkan kepentingannya untuk tujuan bersama dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat 2015.

2. Partisipasi Masyarakat

Untuk membahas partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, perlu diketahui perkembangan pilkada di daerah yang selama ini dilaksanakan, karena walau bagaimanapun peran pemerintah dan peenyelanengga selama ini tidak terlepas dari peran dan partisipasi masyarakat maka keberadaan masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kontekstasi pilkada.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dapat disebut juga sebagai partisipasi politik. Partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari partisipasi politik pada umumnya, kesuksesan dan keberhasilan dari penyelenggaraan pemilihan tersebut

tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dengan segala bentuk spesifiknya.

Sebagaimana partisipasi politik menurut Surbakti (2010:185)¹², berkenaan dengan partisipasi politik, keikutsertaan warga negara dalam proses pemilihan khususnya kegiatan pemungutan suara merupakan serangkaian kegiatan pembuatan keputusan untuk menentukan pemimpin dari pemerintahan daerah tersebut, apakah akan memilih atau tidak memilih. Tidak memilih berarti bisa dikatakan seseorang tersebut memiliki hak pilih namun tidak menggunakan hak pilih.

Berdasarkan definisi peran dan partisipasi masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu penentu berhasilnya pilkada tersebut. Dalam hal ini peran tersebut juga dilakukan oleh masyarakat adat Sai Batin Pesisir Barat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015. Selain masyarakat adat Sai Batin peran itu juga dilakukan oleh ormas islam Nahdlatul Ulama (NU) seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator mengukur kehidupan demokrasi di suatu negara. Partisipasi publik merupakan ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (tidak memiliki kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik berupa kebijakan publik

¹² Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo. Jakarta. Hlm 185.

seperti yang dikemukakan Agustino (2007:59). Sementara Budiardjo (2008:367) mendefinisikan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

“Menurut Mc Closky (dalam Budiharjo, 2008:367) “partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat secara sukarela mengambil bagian dari proses pemilihan pemimpin langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan kebijakan umum”. (*The term political partisipation will refer those voluntary activities by wich members of asociety share in the selection of rules and directly, in the formation of public policy*)”.

Selanjutnya, Samuel Huntington dan Joan Nelson (dalam Budiharjo, 2008:368) memperluas makna partisipasi, tanpa kekerasan dan bersifat legal.

“Partisipasi politik adalah tindakan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. (*By political partisipationwe mean activity by private cityzens designed do influence governmentdecicion making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peacefull or violent, legal or illegal, effective or ineffective*)”.

Berdasarkan pengertian di atas partisipasi dapat dimaknai sebagai aktifitas warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan

pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Jika demikian, maka kepedulian utama dari partisipasi politik adalah tindakan yang akan dilakukan oleh warga yang ditujukan untuk memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh wakil rakyat dan pejabat pemerintah. Karenanya tidak disangsikan lagi bahwa partisipasi politik lebih dihubungkan dengan demokrasi politik yang lebih membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk dapat seluas-luasnya berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik.

Penyampaian aspirasi tersebut kemudian dituangkan dalam tindakan perseorangan dan juga kolektif yang mencakup perihal pemungutan suara (pemilu), kampanye politik, tindakan kelompok-kelompok, hingga protes yang kesemuanya diarahkan pada pemerintah untuk memengaruhi keputusan-keputusan politik yang telah atau sedang diformulasi maupun yang sedang diimplementasi.

Surbakti (2010:183) juga mengkategorikan partisipasi politik berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. Partisipasi individual berarti yang dilakukan oleh seseorang atau per individu, sedang partisipasi kolektif berarti secara serentak atau merupakan kelompok baik kecil maupun besar. Baik partisipasi individual maupun kolektif, dapat dilihat sebagai bentuk partisipasi konvensional dan partisipasi non konvensional, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. Bentuk-bentuk Partisipasi

Partisipasi Konvensional	Partisipasi Non-Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian suara ▪ Diskusi politik ▪ Kampanye ▪ Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan ▪ Komunikasi dengan pejabat politik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Demonstrasi ▪ Konfrontasi ▪ Mogok ▪ Tindakan kekerasan terhadap hartabenda dan atau manusia ▪ Melakukan pembangkangan halus (seperti memilih kotak kosong / tidak memilih / golput) ▪ Revolusi

(Sumber: Gabriel Almond dalam Mas'ood dan Mac Andrews, (2000:47).

Selain itu, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam Pahmi Sy (2010:73) menyebutkan bahwa terdapat dua aspek partisipasi politik, yaitu otonom dan yang dimobilisasi. Partisipasi otonom adalah partisipasi atas kehendak dan kemauannya sendiri, dalam hal ini pelaku tahu apa yang dilakukan, untuk apa dan mengapa melakukan itu serta mengerti dampak dari tindakannya. Sedangkan partisipasi politik yang dimobilisasi adalah partisipasi politik yang dilakukan atas perintah, anjuran, saran, petunjuk atas kehendak orang lain, dalam hal ini pelaku tidak mengetahui mengapa, dan untuk apa melakukan semua itu. Perbedaan ini dapat kita katakan sebagai pengkategorian berdasarkan sifat dari partisipasi politik tersebut.

4. Budaya Politik

Konsep budaya politik muncul untuk mengukur pola orientasi politik masyarakat yang ada dalam sistem politiknya, juga erat kaitannya dengan sikap dan tingkah laku individu dalam sistem politik. Menurut Sitepu (2012:163) menyatakan konsep budaya politik muncul, sejak tahun 1950

saat budaya politik (*political culture*) menjadi alat analisis dalam ilmu politik. Di bawah ini pengertian budaya politik menurut para ahli.

- a. Budiardjo (2008:58) budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.
- b. Kantaprawira (2006:26) budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah, karena sistem politik itu sendiri adalah interrelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan dan wewenang.
- c. Roy Macridis dalam Maksudi, (2012:49) budaya politik adalah sebagai tujuan bersama dan peraturan yang diterima bersama.
- d. Widjaja (1988:250) budaya politik menyangkut masalah sikap dan norma. norma membentuk sikap normatif seseorang terhadap suatu gejala-gejala; benar atau salah, baik atau buruk, suka atau tidak suka.

Berdasarkan pengertian budaya politik di atas, mengartikan suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politik kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Menurut Almond dan Sidney Verba (1984:14) budaya politik dilandasi oleh nilai-nilai yang telah berkembang dan matang di lingkungan masyarakat terutama mengacu pada orientasi politik, sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut.

Indikator budaya politik merupakan pernyataan untuk menyampaikan sikap dan perasaan terhadap sistem politik itu berlangsung. Menurut Pye (dalam Kavanagh, 1982:11) indikator-indikator kebudayaan politik suatu bangsa mencakup faktor-faktor seperti, wawasan politik, sebagaimana

hubungan antara tujuan dan cara setandar untuk penilaian aksi-aksi politik serta nilai-nilai yang menonjol bagi aksi politik. Indikator-indikator budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh interaksi antar orientasi dan antar nilai.

Budaya politik suatu masyarakat berbeda dengan budaya politik masyarakat lain, Perbedaan ini dapat diklasifikasikan dari tipe-tipe budaya politik. Budaya politik pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh sosial, budaya, ideologi, ekonomi, dan kondisi geografisnya. Almond dan Sidney Verba telah mengkalifikasikan tipe budaya politik yaitu, parokial, subjek, partisipan dan campuran.

a. Budaya Politik Parokial

Almond dan Sidney Verba (1984: 20) menyatakan orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komperatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Adalah spesialisasi peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif yang rendah. Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapanharapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik.

b. Budaya Politik Subjek/Kaula

Orientasi kaum subyek/kaula terhadap obyek politik dapat dilihat dari pernyataannya, baik berupa kebanggaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap permusuhan terhadap sistem, terutama terhadap aspek output. Menurut Almond dan Verba (1984:21) budaya politik subyek/kaula memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (input) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (output) sangat rendah.

c. Budaya Politik Partisipan

Pada kaum partisipan dimana perhatian dan intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik sangat tinggi. Tipe budaya politik partisipasi dirinya atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, ia memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya. Menurut Almond dan Verba (1984:22) tipe budaya politik partisipan merupakan bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap aspek input maupun output dari sistem itu.

Budaya politik partisipan masyarakat merealisasi dan memergunakan hak-hak politiknya, dengan demikian masyarakat dalam budaya politik partisipan tidak begitu saja menerima keputusan politik. Kemudian masyarakat ini akan menyadari hak dan kewajibannya serta memergunakan secara aktif. Mereka akan dapat menilai dengan penuh

kesadaran baik terhadap sistem sebagai totalitas, *input* dan *output* maupun terhadap posisi atau peran dirinya sendiri.

d. Budaya Politik Campuran

Budaya politik dapat diartikan sebagai campuran orientasi warga negara, merupakan campuran partisipan, subyek, dan parokial. Pada setiap bangsa budaya politik itu tidak terpaku kepada satu budaya, walaupun di negara maju, namun ternyata tidak semuanya berbudaya partisipan, masih ada yang kaula dan parokial, inilah yang kemudian disebut sebagai budaya politik campuran. Kombinasi antara tiga tipe budaya politik diatas dapat membentuk tipe-tipe budaya politik campuran.

Secara konseptual menurut Almond dan Verba (1984: 27-31), terdapat tiga tipe budaya politik campuran, yaitu:

1. Kebudayaan subyek – parokial, adalah tipe kebudayaan politik dimana sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat kesukaan atau desa atau otoritas feodal dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintah pusat yang bersifat khusus.
2. Kebudayaan parokial – partisipan, terdapat masalah kontemporer mengenai pembangunan kebudayaan di sejumlah negara yang sedang berkembang. di negara tersebut budaya politik yang dominan adalah parokial. Norma-norma struktural yang telah diperkenalkan biasanya bersifat partisipan; demi keselarasan, mereka menuntut suatu kultur partisipan.
3. Kebudayaan partisipan – subyek, sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang aktivis, sementara sisa penduduk lainnya terus diorientasikan ke arah suatu struktur pemerintahan otoritarian dan secara relatif memiliki rangkaian orientasi pribadi yang pasif.

Budaya politik campuran merupakan percampuran dari ketiga budaya politik, antara parokial, kaula, dan partisipan. Adanya tipe politik campuran ini dikarenakan bahwa orientasi terhadap satu tipe tertentu tidak menggantikan tipe yang lain. Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik.

D. Tinjauan Tentang Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan

1. Kelompok Kepentingan (*Interest group*)

Kelompok kepentingan (*Interest group*) adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Menurut Leo Agustino (2007: 96)¹³ kelompok kepentingan merupakan kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, sebagai kelompok yang terorganisasi kelompok kepentingan tidak hanya memiliki sistem keanggotaan yang jelas, tetapi juga memiliki: pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan dan pola komunikasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi.

Kelompok-kelompok kepentingan dapat dibedakan berdasarkan struktur, gaya, sumber pembiayaan dan basis dukungan. Dapat juga

¹³ Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik: sebuah bahasan memahami ilmu politik*. Yogyakarta. Hlm 96.

diorganisasikan berdasarkan keanggotaan kesukuan, ras, etnis, agama atau isu-isu kebijakan pemerintah. Di antaranya kelompok kepentingan yang ada, yang paling mampu secara finansial adalah kelompok dari bidang pekerjaan atau profesi, karena kelompok ini yang paling sering langsung dipengaruhi oleh kebijakan atau tindakan pemerintah. Contohnya perhimpunan pengusaha, persatuan dokter, persatuan guru, advokat dan sebagainya.

Jenis-jenis kelompok kepentingan ini menurut Gabriel A. Almond (dalam Leo Agustino)¹⁴ adalah meliputi:

a. Kelompok Anomik

Kelompok-kelompok anomik, ini terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika dan karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, kelompok ini sering bertumpang tindih (*Overlap*) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional, seperti demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik dan sebagainya. Tetapi kita harus hati-hati menilai, sebab seringkali yang nampak anomik itu kadang-kadang merupakan tindakan yang direncanakan secara teliti oleh kelompok kepentingan yang terorganisir.

b. Kelompok Non Assosiasional

Kelompok kepentingan non-asosiasional, termasuk kategori kelompok masyarakat awam (belum maju) dan biasanya jarang yang terorganisir rapi dan kegiatannya bersifat temporer. Ini mungkin berwujud kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingan secara kadang kala melalui individu-individu, klik-klik kepala keluarga atau pemimpin agama, dan semacam itu. Pertemuan-pertemuan sosial, seringkali menciptakan situasi yang memungkinkan pembicaraan tawar-menawar (*Bargaining*) antara para pembuat keputusan dan kelompok warga negara yang memiliki kepentingan yang sama.

¹⁴ Ibid hlm 97-98.

c. Kelompok Institusional

Organisasi-organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, militer, birokrasi, dan gereja seringkali mendukung kelompok kepentingan institusional atau memiliki anggota-anggota yang khusus bertanggung jawab melakukan kegiatan *lobbying*. Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain di samping artikulasi kepentingan. Kelompok semacam ini bisa menyatakan kepentingannya sendiri maupun mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Contoh kelompok institusional: Partai politik, korporasi bisnis, Badan Legislatif, Militer, Birokrasi, dan lain-lain.

d. Kelompok Assosional

Kelompok asosiasional meliputi serikat buruh, federasi kamar dagang atau perkumpulan usahawan dan insdustrialis, paguyuban etnik, persatuan-persatuan yang diorganisir oleh kelompok-kelompok agama, dan sebagainya. Secara khas kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga staff profesional yang bekerja penuh, dan memiliki prosedur teratur untuk memustuskan kepentingan dan tuntutan.

Kegiatan politik utama dari kelompok asosiasional antara lain melakukan tawar menawar (*bargaining*) di luar saluran-saluran partai politik dengan pejabat-pejabat pemerintah tentang peraturan pemerintah dan usul rencana undang-undang di parlemen. Mereka juga berusaha mempengaruhi opini masyarakat dengan mengiklankan kampanye-kampanye, misalnya, penentangan terhadap usaha nasionalisasi perusahaan tertentu. Contoh lembaga ini adalah Serikat Buruh, Kamar Dagang Dan Industri (KADIN), Paguyuban, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nadhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan lain-lain.

Adapun sifat-sifat kelompok kepentingan antara lain adalah sebagai berikut:

- Independen, artinya bahwa dalam menjalankan visi, misi, tujuan, program, sasaran dan lain-lainnya dilakukan secara bebas dengan tanpa ada intervensi pihak lain.
- Netral, artinya bahwa dalam menjalankan existensinya, tidak tergantung pada pihak lain.
- Kritis, artinya bahwa dalam menjalankan existensinya dilakukan dengan berdasarkan pada data, fakta dan analisis yang mendalam yang dilakukan dengan metode teknik analisis yang sah.
- Mandiri, artinya bahwa dalam menjalankan existensinya dilakukan dengan konsep dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok kepentingan merupakan sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Proses demokrasi Indonesia tidak lepas dari kelompok kepentingan yang berasal dari beragam kalangan masyarakat. Kelompok ini terbentuk saat satu golongan masyarakat merasa terganggu dan mencoba menyuarakan pendapat. sekelompok orang dari satu komunitas atau bahkan yang berbeda latar belakang akan bergabung apabila memiliki perhatian yang sama pada suatu masalah.

2. Kelompok Penekan

Kelompok penekan (*pressure group*) merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Kelompok penekan dapat

terhimpun dalam beberapa asosiasi yang mempunyai kepentingan sama, antara lain :

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan
- c. Organisasi kepemudaan
- d. Organisasi Lingkungan Kehidupan
- e. Organisasi pembela Hukum dan HAM
- f. Yayasan atau Badan hukum lainnya, Mereka pada umumnya dapat menjadi kelompok penekan dengan cara mengatur orientasi tujuan-tujuannya yang secara operasional (melakukan negosiasi) sehingga dapat mempengaruhi kebijaksanaan umum.

Dalam realitas kehidupan politik, kita mengenal berbagai kelompok penekan baik yang sifatnya sektoral maupun regional. Tujuan dan target mereka biasanya bagaimana agar keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih menguntungkan kelompoknya (sekurang-kurangnya tidak merugikan). Kelompok penekan, kadang-kadang muncul lebih dominan dibanding dengan partai politik, manakala partai politik peranannya tidak bisa lagi diharapkan untuk mengangkat isu sentral yang mereka perjuangkan, kondisi inilah yang mendorong kelompok penekan tampil ke depan sebagai alternative terkemuka.

Perbedaan kelompok kepentingan dan kelompok penekan terletak pada bahwa kelompok penekan secara sengaja mengelompokkan diri untuk suatu tujuan khusus. Setelah tujuan khusus itu terlaksana, atau minimal

direspons oleh pemerintah, maka kelompok penekan itu bubar. Dengan demikian perbedaannya lebih pada cara dan sasaran.

E. Tinjauan Tentang Perilaku Pemilih

1. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Menurut Firmanzah dalam Efriza¹⁵ (2012:480) perilaku pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama pada kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Surbakti perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih didalam suatu pemilu maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.

Berdasarkan definisi menurut ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang atau target politik dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau yang paling cocok.

¹⁵ Efriza, 2012. *Political Explore: sebuah kajian ilmu politik*. Bandung: Alfabeta, cv, hal. 480.

2. Tipologi Pemilih

Adapun tipologi pemilih berdasarkan pendekatan dan kesamaan ideologi dan *policy problem solving*, Firmanzah (2007) memetakan tipologi pemilih sebagai berikut:

- a. **Pemilih Rasional**
Pemilih memiliki orientasi tinggi pada *policy problem solving* dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau kandidat dalam program kerjanya.
- b. **Pemilih Kritis** pemilih jenis ini merupakan perpaduan antar tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau kandidat dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka dalam hal yang bersifat ideologis.
- c. **Pemilih Tradisional**
Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai atau seseorang kandidat sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih ini mengutamakan kedekatan budaya, nilai asal-usul, paham dan agama.
- d. **Pemilih Skeptis**
Pemilih ini adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dan kurang memperdulikan program kerja atau *platform* dan kebijakan sebuah partai politik atau kandidat, sehingga kepedulian untuk terlibat dalam aktivitas politik sangat kurang.

3. Teori *Vote Buying*

Vote Buying dalam bahasa sederhana adalah proses jual beli suara, yang merupakan bentuk *Money Politic* yang dilakukan kandidat calon pada pemilih. Sebagaimana Menurut Simon Nichter sebagaimana dikutip oleh Alexander H (2014: 23), *vote buying* (jual beli suara) merupakan salah satu bentuk dari politik uang yang dilakukan dengan cara pemberian uang dalam bentuk uang tunai (*fresh money*) kepada pemilih. Secara sederhana *vote buying* dapat diartikan sebagai praktek pertukaran uang dengan suara dalam nalar transaksional.

Target penerima *vote buying* sendiri bersifat personal kepada individu atau keluarga dan waktu pendistribusian uang dilakukan sebelum pemungutan suara. *Pork barrel* merupakan salah satu bentuk dari *money politic* yang merubah wujud uang dalam bentuk *private goods* kedalam wujud *public goods* seperti pembangunan fasilitas publik yang cakupannya lebih luas. Selain itu dana yang di peroleh didapatkan dari pemerintah, sehingga *pork barrel* merupakan klaim politik yang dilakukan oleh calon anggota legislatif terhadap program pemerintah dengan tujuan untuk mengikat pemilih selaku penerima program untuk memberikan suaranya dalam hari pemungutan suara.

Menurut Alexander H (2014: 25), praktik jual beli suara dilakukan dalam beberapa fase yang meliputi :

- a. Fase Setelah Penetapan Kandidat/Partai Peserta Pemilu.
Pada fase ini pemberian biasanya berupa bingkisan yang disertai dengan atribut sosialisasi atau kampanye kandidat. Bentuk lain yang umum dilakukan adalah bakti sosial dalam bentuk pengobatan gratis, pasar murah, penyediaan sarana ambulance gratis, asuransi gratis dan sebagainya.
- b. Fase Kampanye.
Dalam fase ini pemberian bisa berupa uang untuk transport, konsumsi, rokok dan lain-lain. Dalam kampanye biasanya disediakan hadiah-hadiah, *door prize* yang diundi.
- c. Fase Masa Tenang dan Pemungutan Suara.
Dalam fase ini dikenal istilah serangan fajar atau bahkan ngebom. Yaitu memberi uang atau bingkisan kepada pemilih, *door to door* atau secara berkelompok. Saat pemungutan suara, pemilih dimobilisasi dengan antar jemput.
- d. Fase Pasca Pemungutan Suara.
Setelah pemungutan suara, politik uang tak juga hilang karena politik uang bisa bersifat pra dan pasca bayar. Setelah pemungutan suara, pemenang bisa saja memberikan uang, hadiah kepada pemilihnya. Atau bahkan dalam kedudukannya kemudian memberikan bantuan hibah, bansos dan membagi proyek kepada pendukungnya.

4. Teori Politik Transaksional

Secara umum kita ketahui bahwa politik transaksional adalah suatu bentuk transaksi atau perjanjian antar dua pihak yang saling mempunyai kebutuhan terutama pada praktik politik dimana terdapat proses ada yang memberi dan menerima sesuatu baik berupa materi maupun non materi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, hal ini biasanya dilakukan pada proses pilkada atau pemilu.

Menurut Boissevain dalam Joko Prihatmoko (2005: 54), politik transaksional berarti politik dagang, ada yang menjual dan ada yang membeli. Tentu semuanya membutuhkan alat pembayaran yang ditentukan bersama. Jika dalam jual-beli, maka alat pembayarannya biasanya berupa uang tunai. Pada praktik politik, jika terjadi politik transaksional, ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang dalam transaksi politik tersebut.

Sedangkan menurut Syarief Hidayat (2006: 27) proses politik transaksional yang dilakukan pun bergeser dengan tindakan yang disertai perjanjian menggunakan meterai yang selama ini lazim dipakai untuk perjanjian yang berimplikasi hukum bagi yang mengkhianatnya, tindakan kecurangan tersebut lebih banyak dilakukan tim sukses dan aparat pemerintah. Sepertinya politik transaksional ini selalu saja ada dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, masyarakat dapat diperalat dengan mudah.

Politik transaksional atau pemberian uang atau barang dari calon kepala daerah maupun dari tim sukses calon kepala daerah yang terjadi sangat tidak mendidik. Selain mencederai sistem demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia, pada pemilu-pemilu dan pemilihan kepala daerah selanjutnya rakyat dan calon kepala daerah akan terbiasa melakukan pola seperti itu lagi. Pada masa kampanye para calon kepala daerah yang paham aturan main, akan lebih hati-hati mengumbar pemberian uang atau barang ke konstituen. Sebab, sanksinya cukup berat. Karena itu beberapa calon kepala daerah harus memiliki strategi untuk menyasati larangan politik transaksional itu (Syarief Hidayat, 2006: 28).

F. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Sejumlah perubahan dan penataan sistem politik di Indonesia ditandai dengan proses amandemen UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI NomoR IV / MPR / 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah bersama DPR membahas dan mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari pembentukan UU No 32 tahun 2004 adalah:

“Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sebagai tindak lanjutnya diselenggarakan pilkada langsung pada tahun 2005. Abdullah (2011:53)¹⁶ mengungkapkan beberapa alasan pilkada secara langsung selain sinkronisasi antara pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, alasan lain ialah untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, kedudukan serta legitimasi yang sama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD dan mencegah terjadinya politik uang.

Sarundajang (2011:117) mengatakan bahwa Pilkada sebagaimana pemilu nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui pilkada, rakyat akan secara langsung memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberika legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Pilkada dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah (*legitimate*)¹⁷.

Selanjutnya Suharizal (2011:7) berpendapat secara filosofis munculnya gagasan tentang pilkada secara lansung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah-daerah yang sedang dimulai. Pilkada langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang kredibel dan didukung oleh rakyat.¹⁸

¹⁶ Abdullah, H. Rozali. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas : Dengan Kepala Daerah Secara Langsung*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hlm 53.

¹⁷ Sarundajang. 2011. *Pilkada Langsung: Problematika dan Prospek*. Kata Hasta Pustaka. Jakarta. Hlm 117.

¹⁸ Suharizal. 2011. *Pemilukada : Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm 7.

Pada prinsipnya pemilihan kepala daerah langsung merupakan refleksi dari demokratisasi yang mencerminkan adanya kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan pemerintah daerah secara bersamaan. Pemilihan kepala daerah secara langsung menggambarkan adanya sebuah mekanisme pembentukan pemerintahan yang terlegitimasi karena merupakan hasil dari proses politik yang telah disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku, serta sarana berpartisipasi masyarakat dalam kegiatan politik lokal.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara (Yusdianto, 2010:44).¹⁹

Pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yakni:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi

¹⁹ Yusdianto, 2010. *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010.

dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”²⁰

Berdasarkan materi revisi undang-undang tersebut, pemilihan kepala daerah yang saat ini dilaksanakan secara serentak tidak menjadi jaminan untuk bebas dari permasalahan, akan tetapi pilkada serentak bisa memberi semangat baru baik bagi penyelenggara maupun dari segi keterlibatan elemen masyarakatnya. Pilkada serentak yang diamanatkan pada Undang-Undang di atas dibagi pada berapa gelombang, didalam pasal 201 UU No.1 tahun 2015²¹ disebutkan bahwa:

1. Gelombang pertama pemilihan serentak dilaksanakan bulan Desember 2015 untuk Gubernur, Bupati dan Walikota yang akhir masa jabatannya pada tahun 2015 s.d. Juni 2016.
2. Gelombang kedua pemilihan pemilihan kepala daerah serentak pada dilaksanakan bulan Februari 2017 untuk Gubernur, Bupati dan Walikota yang akhir masa jabatannya pada bulan Juli s.d. Desember 2016 dan 2017.
3. Gelombang ketiga pemilihan pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan bulan Juni 2018, untuk Gubernur, Bupati dan Walikota yang akhir masa jabatannya 2018 dan 2019.

Selanjutnya pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 adalah untuk hasil pemilihan 2015, pemilihan serentak tahun 2022 untuk hasil pemilihan 2017, pemilihan serentak tahun 2023 untuk hasil pemilihan 2018.

²⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

²¹ Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kemudian pada tahun 2027 pemilihan kepala daerah serentak secara nasional dilakukan dan tidak ada lagi pilkada yang dilakukan terpisah. Apabila melihat pembagian gelombang atau periode yang diatur dalam revisi di atas, maka tahun 2015 yang lalu Provinsi Lampung telah melaksanakan pilkada serentak di 8 kabupaten/kota termasuk daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat. Namun untuk tahun 2017 pilkada serentak di Lampung dilaksanakan pada bulan Februari di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Pringsewu, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat lokal untuk memilih pemimpin ataupun pejabat politik untuk memimpin daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai wujud implikasi dari pelaksanaan azas desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah.

G. Kerangka Pikir

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah eksekutif dan legislatif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan daerah.

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Kabupaten Pesisir Barat, ini menarik untuk dicermati karena eksistensi tokoh adat Sai Batin sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat juga merupakan bagian dari partisipasi politik, ternyata dapat memberikan kembali ruang-ruang etnisitas budaya untuk tumbuh subur di masyarakat.

Melihat pada ajang pilkada yang telah bergulir di Pesisir Barat, tampaknya bahwa mesin politik partai politik bukanlah satu-satunya penyokong kemenangan atau suksesnya pilkada. Akan tetapi peran serta masyarakat dalam hal ini tokoh adat Sai Batin juga ikut menentukan. Oleh karena itu, hal ini menjadi fokus penelitian penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana peran komunitas politik dalam pemilihan kepala daerah Pesisir Barat 2015. Namun untuk membatasi studi dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada komunitas politik tokoh adat Sai Batin dan Nahdlatul Ulama (NU) yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan konsepsi teori peran yang dijelaskan di atas, penulis mencoba untuk menganalisa penelitian ini dengan menggunakan teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto (2002: 441) tentang unsur-unsur peranan yang meliputi:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan.
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban.
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan.
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Namun dari keempat unsur tersebut hanya menggambarkan keadaan secara sosiologis. Sedangkan dalam menjawab rumusan masalah maka yang lebih relevan penulis akan menggunakan teori tentang representasi politik, seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu:

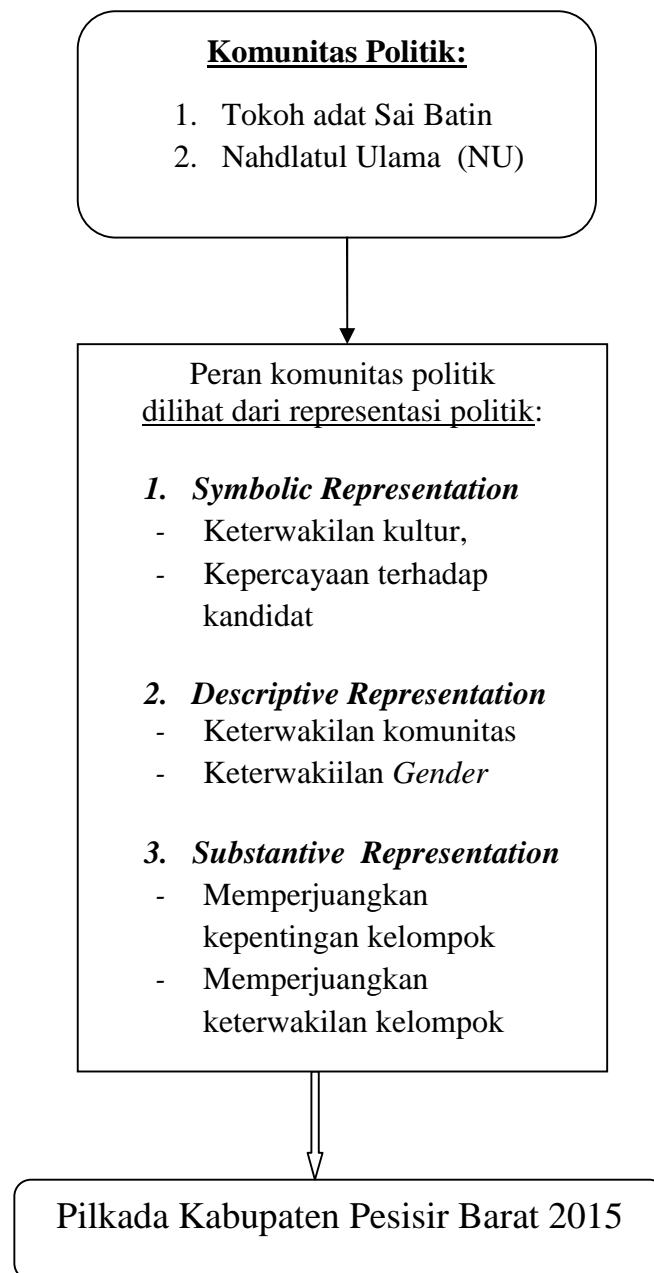
1. *Symbolic Representation*
2. *Descriptive Representation*
3. *Substantive Representation*

Pertama *Symbolic Representation*, bisa dilihat dalam keterwakilan kultur, dalam hal ini komunitas politik tokoh adat Sai Batin Pesisir Barat adalah masyarakat yang berkultur yang tinggal ditempat yang sama dan memiliki tujuan yang sama juga. Berdasarkan adanya komunitas ini, apakah memiliki peran dalam pemilihan kepala daerah Pesisir Barat 2015. Kedua *Descriptive Representation*, adalah tingkat kemiripan antara yang mewakili dan yang diwakili, untuk itu penulis akan melakukan riset untuk menemukan jawaban apakah ada kemiripan komunitas politik tokoh adat Sai Batin dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam perannya mengsucceskan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat 2015.

Ketiga Substantive Representation, adalah aktivitas untuk memperjuangkan kepentingan yang direpresentasikan dalam ranah publik. Dengan demikian

penulis juga akan menggambarkan secara sistematis seperti apa aktivitas komunitas politik tokoh adat Sai Batin dan Nahdlatul Ulama (NU) ini dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir dibawah ini:

Bagan 1. Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005: 6), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Menurut Nawawi (2001:63), metode deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran suatu gejala sosial atau keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Nawawi (2001:66), adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Menurut Nasir (1998:63) metode deskriptif adalah metode yang meneliti, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tipe penelitian kualitatif merupakan metode atau cara untuk menghasilkan dan menggambarkan data yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti memilih tipe penelitian kualitatif dengan metode deskriptif karena peneliti akan menggambarkan tentang peran komunitas politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015. Hal ini tentu sangat berhubungan dengan data yang akan diteliti karena peneliti akan mendeskripsikan kedalam bentuk tulisan berdasarkan data yang didapat baik dengan wawancara ataupun dokumentasi.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2005: 93), masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan guna untuk memperjelas ruang lingkup bahasan dalam penelitian ini, sehingga terhindar dari pengumpulan data pada bidang yang sangat luas dan tidak relevan dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian juga untuk memberi panduan bagi peneliti selama melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada komunitas politik tokoh adat Sai Batin dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat. dengan mengungkapkan apa saja yang dilakukan komunitas tersebut dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Mengidentifikasi siapa saja komunitas politik yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Menganalisa apa saja yang dilakukan komunitas politik tokoh adat Sai Batin dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam pemilihan kepala daerah.
3. Mengidentifikasi peran komunitas politik para tokoh adat Sai Batin dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam pemilihan kepala daerah.
4. Menganalisa dampak komunitas politik tersebut pasca pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan konsepsi teori peran yang dijelaskan pada bab II, untuk menjawab rumusan masalah maka teori yang akan digunakan adalah teori representasi yang dikemukakan oleh Hannah Pitikin (1967) dalam R. Siti Zuhro (2009: 20) menyebutkan empat wajah representasi politik, yaitu *Symbolic, Descriptive* dan *Substantive Representations*.

1. *Symbolic Representation*
2. *Descriptive Representation*
3. *Substantive Representation*

Pertama *Symbolic Representation*, dilihat dalam keterwakilan kultur, yaitu komunitas politik tokoh adat Sai Batin Pesisir Barat, maka secara simbolik akan dianalisa bagaimana representasi politiknya dalam pemilihan kepala daerah Pesisir Barat 2015. Kedua *Descriptive Representation*, adalah tingkat kemiripan antara yang mewakili dan yang diwakili, yaitu komunitas politik tokoh adat Sai Batin dan Nahdlatul Ulama (NU), maka penulis akan menggambarkan kedua komunitas politik ini dalam perannya mengsucceskan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat 2015.

Ketiga Substantive Representation, adalah aktivitas untuk memperjuangkan kepentingan yang direpresentasikan dalam ranah publik. Dalam hal ini yaitu komunitas politik tokoh adat Sai Batin dan Nahdlatul Ulama (NU), maka akan dianalisis apa saja yang dilakukan terkait perannya dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat 2015.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, yaitu pada gedung tokoh adat Sai Batin marga Way Napal yang tergabung dalam Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) terletak di Jalan Lintas Barat Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan Kantor Nahdlatul Ulama (NU) yang ada di Pesisir Barat Khususnya. Selain lokasi utama tersebut, lokasi lain sebagai penambah informasi terkait pilkada yaitu pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat untuk menggali informasi calon kepala daerah terpilih. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi apakah komunitas politik cukup berperan atas terpilihnya calon kepala daerah tersebut dalam hal ini

pasangan Agus Istiqlal - Erlina, meskipun bukan menjadi objek utama dalam penelitian ini.

Peneliti memilih penelitian di Kabupaten Pesisir Barat karena kabupaten ini merupakan kabupaten yang baru pertamakali melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu peneliti juga melihat ada yang menarik di daerah ini karena memiliki keberagaman komunitas politik dan sering disebut juga sebagai bumi para Sai Batin dan Ulama. Sehingga hal ini juga mendorong penulis untuk memfokuskan pada komunitas politik tokoh adat Sai Batin dan Nahdlatul Ulama (NU).

D. Informan

Informan atau narasumber adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sampel dalam penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal populasi atau sampel. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat Sai Batin marga Krui yang tergabung dalam Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL), pengurus Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU), Gerakan Pemuda Anshor, DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat, Ormas Islam Muhammadiyah, Ormas Pemuda Pancasila (PP), LSM Lumbung Informasi Tepat Akurat (LITA) dan perwakilan kader Partai Politik seperti PKB, NasDem serta perwakilan tokoh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Kelompok/Instansi	Jumlah
1	Putrawan J. Ningrat	Ketua Tokoh adat Sai Batin	1
2	A. Darmansyah Yusie	Tokoh Adat MPAL	1
3	Tokoh-Tokoh Sai Batin	Marga Pesisir Barat	2
4	Marzuki	Ketua NU Pesisir Barat	1
5	Heri Kiswanto	Ketua GP Ansor Pesisir Barat	1
6	Muhammad Towil	Wakil Ketua DPRD	1
7	Agus Cik	Anggota DPRD Pesisir Barat	1
8	Agus Istiqlal	Bupati Terpilih	1
9	Erlina	Wakil Bupati Terpilih	1
10	Jon Edwar	Tokoh Muhammadiyah	1
11	Sudarmansyah	Tokoh Masyarakat Pesisir Barat	1
12	Partai Politik	Perwakilan Partai Politik	3
13	Ariska Warga Negara	Akademisi Unila	1
14	Abdulsyani	Akademisi Unila	1
15	Fauzi Nurdin	Akademisi IAIN	1
16	Aria Lukita Budiwan	Calon Bupati	1
17	Jamal Naser	Calon Bupati	1
18	Sakdan	Tim Sukses Agus-Erlina	1
19	Taslim	Tim Sukses Jamal-Syahrial	1
20	Imron Hakim	Tim Sukses Oking-Topani	1
21	Tulus Basuki	Ketua KPUD Pesisir Barat	1
22	David Satria Jaya	Bagian Hukum KPUD	1
23	Heri Azka	Anggota Panwaslu 2015-2016	1
24	Samsi Rahman	Kepala Kesbangpol	1
25	Komunitas Politik	Ormas Pesisir Barat	7
Jumlah			34

(Sumber: data diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara).

Berdasarkan tabel di atas maka informan pada penelitian ini berjumlah 34 Orang. Diantaranya dari kalangan ormas, tokoh masyarakat, tokoh adat, DPRD, Bupati dan wakil bupati dan akademisi. Hal ini tentu bisa saja berubah sesuai kondisi keabsahan data yang diperoleh. Namun peneliti tetap berfokus pada komunitas politik tokoh adat Sai Batin dan NU, sesuai tujuan penelitian yaitu peran komunitas politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang isinya menyangkut tentang masalah yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, yang diambil dari kantor Sai Batin marga Way Napal yang tergabung dalam Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Pesisir Barat dan Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) dengan permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan beberapa narasumber yang dianggap telah memenuhi syarat atau relevan dengan penelitian ini. Wawancara merupakan instrument kunci pada penelitian ini.

2. Dokumentasi

Pengambilan data yang diperoleh berdasarkan informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung keterangan maupun fakta yang berhubungan dengan obyek penelitian.

G. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif untuk menganalisa data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan memasukkan data dari informan atau wawancara yang kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan realibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber atau informan data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi.

Menurut Moleong (2007: 330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan adalah teknik triangulasi yang dikembangkan oleh Denzim (dalam Moleong, 2007: 331) ada tiga triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu:

1. Triangulasi pengamat, yaitu adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil aktivitas penelitian, seperti dari akademisi. Dalam hal ini akademisi yang dimaksud adalah akademisi dari Fisip Unila dan IAIN yang menguasai dan mumpuni bidang politik terutama tentang pemilihan kepala daerah.
2. Triangulasi teori, yaitu peneliti menggunakan berbagai teori yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini beberapa teori yang digunakan akan terlihat dalam bab pembahasan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.
3. Triangulasi metode, yaitu menggunakan metode seperti wawancara dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung

Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Lampung adalah sebuah Provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan. Provinsi Lampung dengan Ibu Kota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Betung.

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak diantara 105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah timur dengan Laut Jawa. Dengan jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2013 sebanyak 15 Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Kota Bandar Lampung
2. Kabupaten Lampung Selatan
3. Kabupaten Lampung Tengah
4. Kabupaten Lampung Timur
5. Kabupaten Tulang Bawang
6. Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Kabupaten Mesuji
8. Kota Metro

9. Kabupaten Lampung Utara
10. Kabupaten Way Kanan
11. Kabupaten Lampung Barat
12. Kabupaten Tanggamus
13. Kabupaten Pringsewu
14. Kabupaten Pesawaran dan
15. Kabupaten Pesisir Barat.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat. Selain itu Provinsi Lampung juga memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.586.492 jiwa, dengan Visi Lampung Maju dan Sejahtera 2019, sedangkang Misi yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah;
 2. Meningkatkan infrstruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat dan toleransi kehidupan beragama;
 4. Meningkatkan kelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan
 5. Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik.
- (sumber: Lampungprovinsi.go.id).

B. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat

1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat mulai dirintis sejak tahun 2005. Para tokoh masyarakat di daerah ini, pada tanggal 20 Februari membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat (P3KPB). Panitia terbagi dalam tiga kelompok wilayah kerja kepantiaan yaitu: wilayah kerja panitia persiapan di tingkat kabupaten induk (Kabupaten Lampung Barat) yang berpusat kedudukan di Krui, wilayah kerja panitia persiapan di tingkat Propinsi Lampung yang berkedudukan

di Bandar Lampung, dan wilayah kerja panitia persiapan di tingkat pusat yang berkedudukan di Jakarta. Adapun unsur susunan pimpinan Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat (P3KPB) meliputi:

- P3KPB yang di Provinsi :
 - (1) Ketua : Aidin Adlan
 - (2) Sekretaris Umum : Edwin Hanibal
 - (3) Bendara Umum : Herlambang

- P3KPB yang di Kabupaten atau di Krui
 - (1) Ketua : April Liswar
 - (2) Sekretaris Umum : Dwi Karyanto
 - (3) Bendahara Umum : Fieteer (KCMU)

Kemudian kepengurusan Presidium Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat, yang telah sukses melahirkan Kabupaten Pesisir Barat secara ril dan terbukti adalah:

- (1) Ketua Umum : Al Saqiq Hafid
- (2) Sekretaris Jenderal : Dwi Karyanto
- (3) Bendahara Umum : Monalisa

Sangat luar biasa memang, namun niat luhur sebagian masyarakat untuk tetap melahirkan Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan rencana yaitu "Demi Kesejahteraan Masyarakat" secara umum dengan melakukan penggalan potensi terpendam serta mengolah potensi yang ada dengan proses yang matang, guna bermanfaat bagi masyarakat terutama melahirkan lapangan pekerjaan dan meningkatnya taraf hidup masyarakat Pesisir Barat secara umum. Nama Kabupaten Pesisir Barat berasal dari kata 'Pesisir' dan 'Barat', dikarenakan seluruh wilayah Pesisir Barat yang membentang dari utara sampai selatan berada pada pesisir pantai bagian barat Provinsi Lampung.

Proses lahirnya Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah perjuangan yang panjang dan melelahkan dengan berbagai halangan serta rintangan, dimulai dari tidak setujunya kabupaten induk dengan melakukan gerakan politik dan penekanan terhadap pemerintah pusat ataupun tekanan terhadap para *stakeholder* pemekaran yang terlibat dalam kepanitiaan, sampai pada pembelengguan secara tidak langsung dengan menggunakan anggaran daerah kabupaten induk, artinya anggaran negarapun dimainkan serta dikorbankan untuk membuat terlunta-luntanya perjuangan melahirkan kabupaten Pesisir Barat karena perlu diketahui bersama salah satu alasan pemekaran ini dikarenakan Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu Kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung berdasarkan pemaparan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dari tahun 2012-2015.

Pernyataan di atas dibenarkan oleh salah satu keanggotaan Panitia Pemekaran Kabupaten Pesisir Barat Parit Wijaya, ia mengatakan bahwa:

Sejarah pemekaran Pesisir Barat memang cukup alot, artinya banyak kepentingan yang bermain, contohnya tarik ulur dukungan dan persetujuan dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah Lampung Barat. Selain itu ke tidak kompaknya antara kepanitiaan yang ingin menjadi terdepan, artinya mau dianggap paling berjasa. Seharusnya Pesisir Barat terbentuk berbarengan dengan Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat. Namun karena alotnya kepengrusan dan dukungan dari pemerintahlah yang menjadi penyebab terhambatnya Pesisir Barat terbentuk. (Hasil wawancara dengan Parit Wijaya, salah satu keanggotaan panitia pemekaran Pesisir Barat, pada 26 November 2016).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi pembentukan Kabupaten Pesisir Barat adalah aspirasi dari seluruh masyarakat Krui yang menginginkan kesejahteraan, sehingga

seluruh elemen masyarakat mendukung penuh atas terbentuknya daerah otonomi baru tersebut. Selain itu yang menjadi alasan penting adalah masalah pelayanan yang dinilai sebagian besar masyarakat Krui sangat minim, hal ini dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh menuju pemerintah daerah sebelumnya yaitu Lampung Barat.

2. Geografis Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui adalah salah satu dari Lima belas kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012, dengan batas:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Prahu Kecamatan BalikBukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tuguratu, Desa Banding Agung Kecamatan Suoh, Desa Hantatai, Desa Tembelang, Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Sirnagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Naningan Kabupaten Pesisir Barat,

- Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas $\pm 2.907,23$ Km² atau 8,39% dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, dengan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya sebagai petani dan nelayan. Secara geografis letak Kabupaten Pesisir Barat pada koordinat : 4°, 40', 0" - 6°, 0', 0" Lintang Selatan dan 103°, 30', 0" - 104° , 50', 0" Bujur Timur. Secara Topografi Kabupaten Pesisir Barat dibagi menjadi 3 (tiga) unit topografi yakni:

- a. Daerah dataran rendah (ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan laut)
- b. Daerah berbukit (ketinggian 600 sampai 1.000 meter dari permukaan laut)
- c. Daerah pegunungan (Daerah ketinggian 1.000 sampai dengan 2.000 meter dari permukaan laut).

Kabupaten Pesisir Barat telah dipimpin oleh Penjabat Bupati Kherlani yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-270 tanggal 19 April 2013 dan dilantik di Jakarta pada tanggal 22 April 2013. Pada tanggal 24 April 2014, Kherlani dilantik sebagai Penjabat Bupati untuk kali kedua dan pada tanggal 22 April 2014, Qudrotul Ikhwan dilantik oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo sebagai Penjabat Bupati Pesisir Barat untuk menggantikan Kherlani bertempat di Komplek Kantor Gubernur Lampung.

Keadaan wilayah sepanjang Pantai Pesisir Barat umumnya datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar 3% sampai 5%. Di bagian Barat Laut Kabupaten Pesisir Barat terdapat gunung-gunung dan bukit, yaitu Gunung Pugung (1.964 m), Gunung Sebayan (1.744 m), Gunung Telalawan (1.753 m) dan Gunung Tampak Tunggak (1.744 m).

Wilayah Pesisir Barat di bagian barat mempunyai sungai-sungai yang mengalir pendek dengan pola aliran dendritik yang menyebabkan daerah ini ditandai dengan jarangya banjir sebab pada saat musim hujan datang bersamaan air tidak terkonsentrasi dan timing lagnya menjadi lambat. Delta marine ditandai dengan agregat kasar hasil endapan aluvial vulkanik, hal ini menyebabkan bila air besar muara sungai sering berpindah (meander).

Sektor pariwisata merupakan potensi andalan Kabupaten Pesisir Barat, setiap tahun ratusan bahkan ribuan turis datang ke Krui untuk berlibur, berselancar dan menikmati keindahan pantainya. Selain pantai Krui memiliki dua pulau eksotis yaitu Pulau Pisang dan Pulau Betuah yang

alami dan keindahannya tidak kalah dengan pulau-pulau destinasi wisata di dunia, hanya memang potensi itu belum tereksplorasi secara maksimal. Akses perhubungan dari Kota Bandar Lampung menuju Krui, bisa dilakukan melalui darat, laut, dan Udara.

Krui Pesisir Barat terdapat Bandara Serai, Pelabuhan Kuala Stabas dan Jalan nasional lintas Barat yang melewati seluruh wilayah Krui yang berada digaris pantai sepanjang 200 Kilometer lebih. Potensi hasil bumi dan hutan, juga bagus dan memiliki nilai jual tinggi, seperti Damar Mata Kucing yang merupakan getah damar kualitas terbaik di dunia dan telah diakui internasional yang berasal dari Krui. Belum lagi hasil bumi lainnya seperti cengkeh, kopi, lada dan kakao. Krui juga merupakan wilayah pertanian khususnya di Kecamatan Pesisir Selatan yang memiliki ribuan hektar sawah dengan sistem pengairan irigasi.

3. Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Barat

2.1 Visi Kabupaten Pesisir Barat

Menuju Kota Modern Berbasis Lingkungan.

2.2 Misi Kabupaten Pesisir Barat

- Meningkatkan pemanfaatan potensi Perikanan dan
- Meningkatkan pengelolaan Pariwisata dan Budaya Daerah.
- Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan umum, jaringan transportasi dan komunikasi.
- Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dan terjangkau.
- Meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau.
- Meningkatkan kesadaran pembangunan berwawasan lingkungan.

Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat, yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 2012. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 desa (di Pesisir Barat disebut Pekon) dan 2 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebesar \pm 136.370 jiwa. Dilihat dari luas wilayah kecamatan Bengkunt Belimbing merupakan kecamatan terluas di kabupaten Pesisir Barat dengan luas wilayah 97.122 ha atau 32,69 % dari luas total Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan untuk luas wilayah kecamatan terkecil adalah kecamatan Krui Selatan dengan luas wilayah 3.625 Ha atau 1,26% dari luas total wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Untuk mengetahui kecamatan-kecamatan dan jumlah kelurahan/pekon yang ada di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Nama, luas wilayah dan jumlah pekon per-kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/desa		Luas Wilayah Administrasi	
		Kelurahan	Desa/Pekon	(Ha)	(%) thd total
1	Bengkunt	-	1	97.122	32,69
2	Bengkunt	-	9	21,503	7,45
3	Ngambur	-	9	24,056	11,33
4	Pesisir Selatan	-	1	40.917	14,17
5	Krui Selatan	-	1	3.625	1,26
6	Pesisir Tengah	2	6	120.580	4,18
7	Way Krui	-	1	4.283	1,42
8	Karya Penggawa	-	1	9.566	7,31
9	Pesisir Utara	-	1	11.212	2,92
10	Lemong	-	1	39.435	15,76
11	Pulau Pisang	-	6	252.00	1,51
LUAS KAB. PESISIR		2	11		

(Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 2015).

4. Sosial Budaya Kabupaten Pesisir Barat

Sebagaimana etnis Lampung pada umumnya, masyarakat Pesisir Barat Lampung menganut sistem kekerabatan *patrilineal-primogenitur*, artinya bahwa seluruh harta pusaka tanah, rumah, pekarangan, serta seluruh harta kekayaan sebuah keluarga hanya akan diwariskan pada anak laki-laki tertua. Dengan demikian harta pusaka tanah tidak pecah terbagi-bagi. Anak laki-laki lainnya tidak mendapat warisan harta pusaka, dan apabila mereka tetap tinggal di desa sebagai petani, mereka hanya sebagai petani penggarap tanah pusaka yang dikuasai oleh kakak laki-laki tertua mereka. Meskipun demikian, realitas di lapangan lebih banyak menunjukkan bahwa mereka lebih suka pergi merantau meninggalkan desanya untuk mencari takdir kehidupannya sendiri.

Sebagai salah satu daerah yang menurunkan suku-suku di Lampung, tentu masyarakat penduduk asli Pesisir Barat memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Dari berbagai kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, ada beberapa budaya adat yang banyak diminati oleh wisatawan, antara lain adalah Upacara Adat "*Buttetakh*", yaitu upacara adat yang dilakukan pada saat pemberian gelar pada raja atau Sai Batin marga dan alam *gemisekh* yang dipakai dalam penyambutan Tamu Agung, serta upacara tradisional lainnya yang sangat khas dan masih dilestarikan secara turun-temurun hingga saat ini.

Salah satu contoh di daerah Pekon Pugung Tampak, Kecamatan Pesisir Utara dan sekitarnya terdapat pula pesta *kekicekhan* yaitu pesta rakyat

yang dilakukan pada saat menyambut dan memeriahkan Hari Raya Idul Fitri. Pesta *kekicekhan* juga biasa dipentaskan untuk memeriahkan acara-acara tertentu, misalnya acara pernikahan, panen raya padi.

Bagi masyarakat Pesisir Barat Lampung, sistem kekerabatan *patrilenial-primogenitur* sebagaimana yang mereka anut tidak hanya merupakan *center* dari adat pewarisan dan pola menetap saja, melainkan juga merupakan hakikat kehidupan mereka itu sendiri. Perekonomian, struktur sosial, sistem perkawinan, ritual, hukum adat, masyarakat Pesisir Barat Lampung pada dasarnya selalu berpusat pada sistem kekerabatan mereka. Dengan demikian, pembicaraan mengenai sistem kekerabatan masyarakat Pesisir Barat Lampung dapatlah mencakup segala aspek kehidupan mereka. Salah satunya, yaitu berkenaan dengan aktivitas ekonomi pertanian masyarakat Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Suku Sai Batin mendiami daerah Pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran Suku Sai Batin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Barat dan Pesisir Barat. Seperti juga Suku Pepadun, Suku Sai Batin atau Peminggir menganut sistem kekerabatan *patrilineal* atau mengikuti garis keturunan ayah. Meski demikian, Suku Sai Batin memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi. “Sai Batin” bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Suku Sai Batin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan.

Budaya Suku Sai Batin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Tidak seperti Suku Pepadun, tidak ada upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat.

Ciri lain dari Suku Sai Batin dapat dilihat dari perangkat yang digunakan dalam ritual adat. Salah satunya adalah bentuk siger (*sigekh*) atau mahkota pengantin Suku Sai Batin yang memiliki tujuh lekuk/pucuk (*sigokh lekuk pitu*). Tujuh pucuk ini melambangkan tujuh adoq, yaitu *suttan, raja jukuan/depati, batin, radin, minak, kimas dan mas*. Selain itu, ada pula yang disebut awan gemisir (*awan gemisikh*) yang diduga digunakan sebagai bagian dari arak-arakan adat, diantaranya dalam prosesi pernikahan. Adapun suku bangsa Lampung yang beradat Sai Batin terdiri dari :

1. Peminggir Melinting (Meninting)
2. Peminggir Teluk (Bandar Lampung)
3. Peminggir Semaka Komerling (Komerling)
4. Bandar Enom Semaka (Tanggamus)
5. Bandar Lima Way Lima (Pesawaran)
6. Marga Lima Way Handak (Lampung Selatan)
7. Telu Marga Ranau (Provinsi Sumatera Selatan)
8. Enom Belas Marga Krui (Pesisir Barat)
9. Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten)

Sedangkan nama-nama marga yang ada di Pesisir Barat, sebagai berikut:

1. Belimbing Bandar Dalam Bengkumat
2. Bengkumat Sukamarga Bengkumat
3. Ngaras Negeri Ratu Ngaras Bengkumat
4. Ngambur Negeri Ratu Ngambur Pesisir Selatan
5. Tenumbang Negeri Ratu Tenumbang Pesisir Selatan
6. Way Napal Way Napal Krui Selatan
7. Pasar Krui Krui Pesisir Tengah
8. Ulu Krui Gunung Kemala Pesisir Tengah
9. Pedada (Penggawa V Ilir) Pedada Pesisir Tengah

10. Bandar (Penggawa V Tengah) Bandar Pesisir Tengah
11. Laay (Penggawa V Ulu) Laay Karya Penggawa
12. Way Sindi Way Sindi Karya Penggawa
13. Pulau Pisang Pulau Pisang Pesisir Utara
14. Pugung Tampak Pugung Tampak Pesisir Utara
15. Pugung Penengahan Pugung Penengahan Lemong
16. Pugung Malaya Malaya Lemong.

C. Identitas Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari komunitas politik yang ada di Pesisir Barat yang terdiri dari: Tokoh adat Sai Batin, Ormas Islam, Calon Bupati, Bupati terpilih, KPUD, DPRD, KESBANGPOL, Partai Politik, Tokoh Masyarakat dan Pengamat Politik atau akademisi untuk mendapatkan data yang lebih akurat, sebagai acuan atau penguat. Berikut ini uraian singkat identitas informan penelitian, yaitu:

1. Informan Komunitas Politik Pesisir Barat

- a. Nama : Putrawan Jaya Ningrat, S.Pd., M.Si.
 Umur : 42 Tahun
 Pekerjaan : Kepala Sekolah SMA N Ngambur
 Komunitas : Ketua Tokoh Adat Sai Batin
 (Marga Way Napal)
 Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Way Napal
 Kecamatan Krui Selatan
- b. Nama : Drs. AE.Wardana Kasuma.
 Umur : 50 Tahun
 Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Pesisir Barat
 Komunitas : Tokoh Adat Sai Batin
 (Marga Pugung Tampak Pesisir Utara)
 Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Negeri Ratu
 Pugung Tampak Kecamatan Pesisir Utara
- c. Nama : A. Zulkoini Sarif, S.H.
 Umur : 56 Tahun
 Pekerjaan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 Komunitas : Tokoh Adat Sai Batin
 (Marga Negeri Ratu Ngaras)
 Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Suka Marga
 Kecamatan Bengkunt Belimbing

- d. Nama : Drs. A. Darmansyah Yusie
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Tim Pakar DPRD Pesisir Barat
Komunitas : Tokoh MPAL Lampung
Alamat : Jl. Terong No. 54 Kemiling,
Kecamatan Kemiling Bandar Lampung
- e. Nama : Marzuki, S.Ag., S.Pd., M.Pd.
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Kepala Dinas Sosial Pesisir Barat
Komunitas : Ketua Nahdlatul Ulama (NU)
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Seray
Kecamatan Pesisir Tengah
- f. Nama : Drs. Jon Edwar, M.Pd.
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Kepala Bagian Humas dan Protokol
Komunitas : Tokoh Muhammadiyah
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Tanjung Setia
Kecamatan Pesisir Selatan
- g. Nama : Heri Kiswanto, S.Sos.I.
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Tenaga Ajar
Komunitas : Ketua GP Ansor
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Biha
Kecamatan Pesisir Selatan
- h. Nama : Ifan Sofyan
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Komunitas : Pengurus Ormas Kumpulan Masyarakat
Pesisir Barat (KUMPAR)
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Lintik
Kecamatan Krui Selatan
- i. Nama : Indra
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Wartawan
Komunitas : Ketua Ormas Lumbung Informasi
Tepat Akurat (LITA)
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Pahmungan
Kecamatan Pesisir Tengah
- j. Nama : Drs. Parit Wijaya
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Ketua Lembaga Pengawas Pembangunan
Daerah Kabupaten Pesisir Barat

- Komunitas : Pengurus Puja Kesuma
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Jambat
Kecamatan Way Kruai
- k. Nama : Aprita Wati, S.Pd.
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Guru SMP 3 Kruai
Komunitas : Ketua PC. Muslimat Perempuan
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Kampung Jawa
Kecamatan Pesisir Tengah
- l. Nama : Mirton Setiawan, S.Pd.
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Sekcam Bengkunt
Komunitas : Ketua DPD KNPI Pesisir Barat
Alamat : Jl. Lintas Barat Kruai
Kecamatan Pesisir Tengah
- m. Nama : Ruspandi
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Komunitas : Ketua MPC Pemuda Pancasila
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Kampung Jawa
Kecamatan Pesisir Tengah
- n. Nama : Haryadi
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Wirausaha
Komunitas : Pengurus Pejuang Siliwangi Indonesia (PSI)
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Lintik
Kecamatan Kruai Selatan

2. Informan Pemerintah Pesisir Barat dan Calon Bupati

- a. Nama : Dr. Drs. Agus Istiqlal, SH., M.H.
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Bupati Pesisir Barat 2015-2020
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Gunung Kemala
Kecamatan Way Kruai
- b. Nama : Erlina, S.P., M.H.
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Wakil Bupati Pesisir Barat 2015-2020
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Penengahan
Kecamatan Karya Penggawa

- c. Nama : Aria Lukita Budiwan, S.T.
(Calon Bupati 2015-2020)
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Rawas
Kecamatan Pesisir Tengah
- d. Nama : Ir. Jamal Naser
(Calon Bupati 2015-2020)
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Konsultan
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Kuala
Kecamatan Pesisir Tengah
- e. Nama : Samsi Rahman S.E., M.M
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Kepala KESBANGPOL Pesisir Barat
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Pahmungan
Kecamatan Pesisir Tengah

3. Informan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Pesisir Barat

- a. Nama : Sakdan, S.Fil.I.
Umur : 29 Tahun
Pekerjaan : Honorer Pemda Pesisir Barat
(Tim Sukses Agus Istiqlal-Erlina)
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Sumur Jaya
Kecamatan Pesisir Selatan
- b. Nama : Muklis, S.Ag.
(Tim Sukses Aria Lukita-Efan Tolani)
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Kampung Jawa
Kecamatan Pesisir Tengah
- c. Nama : Taslim
(Tim Sukses Jamal Naser-Syahrial)
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Pengusaha Kelapa
Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Tanjung Setia
Kecamatan Pesisir Selatan
- d. Nama : Imron Hakim
(Tim Sukses Oking Ganda-Irawan Topani)
Umur : 44 Tahun

Pekerjaan : Wirausaha
 Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Paku Negara
 Kecamatan Pesisir Selatan

4. Informan Penyelenggara Pemilu

- a. Nama : Tulus Basuki, S.Pd.
 Umur : 41 Tahun
 Pekerjaan : Ketua KPUD Pesisir Barat
 Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Rawas
 Kecamatan Pesisir Tengah
- b. Nama : David Satria Jaya, S.A.N.
 Umur : 30 Tahun
 Pekerjaan : Sekretariat Bagian Hukum KPUD.
 Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Kampung Jawa
 Kecamatan Pesisir Tengah
- c. Nama : Heri Azka, S.Pd.
 Umur : 34 Tahun
 Pekerjaan : Anggota Panwaslu 2015-2016
 Alamat : Jl. Pekon Suka Raja Kecamatan Way Krui

5. Informan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat

- a. Nama : M. Towil
 Umur : 48 Tahun
 Pekerjaan : Wakil 1 DPRD 2014-2019
 Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Marang
 Kecamatan Pesisir Selatan
- d. Nama : Agus Cik
 Umur : 45 Tahun
 Pekerjaan : Anggota DPRD 2014-2019
 Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Ngambur
 Kecamatan Ngambur

6. Informan Perwakilan Kader Partai Politik Pesisir Barat

- a. Nama : Kanadi
 Umur : 48 Tahun
 Pekerjaan : Anggota DPRD 2014-2019
 (Ketua PAC PDI-P Kec. Pesisir Selatan)
 Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Biha
 Kecamatan Pesisir Selatan

- b. Nama : Ahmad Husaini, S.Pdi.
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan : Anggota DPRD 2014-2019
 (Kader PKS Kab. Pesisir Barat)
 Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Biha
 Kecamatan Pesisir Selatan

7. Informan Tokoh Masyarakat Pesisir Barat

- a. Nama : Sudarmansyah, S.E.
 Umur : 52 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Biha
 Kecamatan Pesisir Selatan
- b. Nama : Kusnan Sirat
 Umur : 57 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon Ulok Manik
 Kecamatan Pesisir Selatan

8. Informan Akademisi/Pengamat Politik

- a. Nama : Drs. Abdulsyani, M.IP.
 Umur : 59 Tahun
 Pekerjaan : Dosen Tetap Fisip Unila
 Alamat : Jl. P. Antasari, Kedamaian
 Bandar Lampung
- b. Nama : Ariska Warganegara, S.IP., M.A.
 Umur : 35 Tahun
 Pekerjaan : Dosen Tetap Fisip Unila
 Alamat : Jl. Ki Maja No. 9 Way Halim,
 Kota Bandar Lampung
- c. Nama : Prof. Dr. Fauzi Nurdin, M.S.
 Umur : 59 Tahun
 Pekerjaan : Dosen Tetap IAIN Raden Intan Lampung
 Alamat : Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin,
 Sukarame, Kota Bandar Lampung
 (Fak. Ushuluddin IAIN Raden Intan).

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran komunitas politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015 dapat dilihat dari tiga aspek representasi politik, yaitu *Symbolic Representation*, *Descriptive Representation* dan *Substantive Representation*.

1. *Symbolic Representation*

Keterwakilan Kultur atau kelompok yang diwakili, yaitu Komunitas politik Tokoh Adat Sai Batin memiliki peran dalam pilkada Pesisir Barat berupa musyawarah antarkader untuk membahas pilkada, silaturahmi dengan pemda setempat dan melakukan sosialisasi pilkada melibatkan 16 Sai Batin, KPUD dan masyarakat. Komunitas politik Nahdlatul Ulama (NU), perannya melalui koordinasi antarkader, musyawarah dengan kader provinsi serta melakukan sosialisasi pilkada bersamaan dengan KPUD. Sebagian besar komunitas politik yang ada di Pesisir Barat memiliki peran dalam pilkada, khususnya adat Sai Batin dan NU telah mewakili kelompoknya baik secara organisasi maupun secara kelembagaan.

2. *Descriptive Representation*

Kemiripan Komunitas dan keterwakilan *gender*, Komunitas politik tokoh adat Sai Batin dan NU memiliki kemiripan untuk ikut serta

berperan dalam pemilihan kepala daerah. Kemiripan tersebut berupa aspirasi berperan penting, yaitu dengan ikut serta berpartisipasi dalam pilkada. Keterwakilan *gender*, yaitu komunitas politik NU yang merupakan salah satu kadernya adalah perempuan yang juga calon wakil bupati pasangan nomor urut 1 Agus Istiqlal-Erlina, sehingga ada tingkat keterwakilan *gender* pada komunitas politik tersebut. Dukungan dan perannya berupa himbauan pada kelompok perempuan pada saat pengajian yang dilaksanakan oleh pengurus Muslimat Perempuan.

3. *Substantive Representation*

- a. Memperjuangkan kepentingan dan keterwakilan kelompok, yaitu komunitas politik tokoh adat Sai Batin dan NU, yang secara tidak langsung merepresentasikan kepentingannya melalui arah musyawarah yang baik. Salah satu yang dilakukan tokoh adat Sai Batin dalam pilkada adalah dengan mengutamakan komunikasi pada semua kandidat agar tercipta hubungan dan tujuan yang baik. Komunitas politik NU memperjuangkan kepentingan dan keterwakilan kader yang menjadi peserta pilkada dengan menghimbau masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan serta memenangkan kader.

Komunitas politik ini berperan dalam pilkada karena adanya unsur kesadaran politik aktif, orientasi kepentingan dan tujuan yang berkelanjutan. Secara kelembagaan memperjuangkan kepentingan khalayak dan juga kepentingan komunitas yang dijalankan. NU yang secara langsung juga memperjuangkan

kadernya sebagai salah satu peserta pilkada agar bisa bertahan dan memenangkan pilkada. Dampak positif yang didapat oleh tokoh adat Sai Batin adalah adanya rasa bangga pada pemerintah terpilih karena telah memberikan perhatian pada 16 marga Sai Batin diberikan bantuan dana pembangunan gedung senilai 1 miliar per gedung guna melestarikan dan mensejahterakan budaya lokal yang ada di Pesisir Barat. Sedangkan komunitas politik NU adalah dengan didapatnya dana 200 juta untuk kepengurusan ormas NU dan secara politis telah mendapat kesempatan menduduki jabatan strategis di pemerintahan, yakni beberapa kader NU yang menjadi kepala dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pesisir Barat.

B. Saran

1. Sebagai komunitas politik yang ada di Pesisir Barat yang memiliki struktur dan badan hukum, sebaiknya tetap mengutamakan kualitas pilkada dengan melakukan kerjasama atau komunikasi yang baik dengan seluruh elemen dan pemerintah setempat.
2. Sebagai Penyelenggara Pemilu (KPUD) Pesisir Barat, diharapkan mampu mengkoordinir setiap komunitas politik yang ada untuk bersama-sama bersinergi dalam mensukseskan pilkada hingga proses penyelenggaraan pemerintahan di Pesisir Barat khususnya.
3. Pemerintah dalam hal ini bupati dan wakil bupati terpilih, diharapkan mampu merepresentasikan hubungan baik dengan semua lapisan, bersikap adil dan bijaksana dalam segala urusan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi: Sistematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abdullah, H. Rozali. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas: Dengan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta.
- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. (terjemahan Sahat Simamora). Jakarta: Bina Aksara.
- Alexander, Herbert. 2014, *Sikap dan Perilaku Pemilih Terhadap Politik Uang Survei Dapil September Oktober 2013 dan Survei Nasional Maret 2013, Indikator Politik Indonesia*, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2009. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Efriza, 2012. *Political Explore: sebuah kajian ilmu politik*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik. Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hidajah, Siti Hidajatul. 2004. *Birokrasi dan Pembentukan Civil Society: Analisis Peran dan Fungsi Birokrasi di Indonesia*. Pukad- Hali.
- Hidayat, Syarif. 2006. *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Pilkada*. Jakarta: P2E-LIPI.
- Kansil. 2008. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Koswara, E. 2002. *Otonomi Daerah Untuk Daerah dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Candi Cipta Piramida.

- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Kavanagh, Dennis. 1982. *Kebudayaan Politik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Teknik Triangulasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari, 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- R. Zuhro, Siti. 2009. *Demokrasi Lokal: Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak.
- Sarundajang. 2011. *Pilkada Langsung: Problematika dan Prospek*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Seorjono. 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharizal. 2011. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Susanto, Harry Eko. 2009. *Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah: Tinjauan Tentang Dinamika Politik Dan Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sy, Pahmi. 2010. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Thoha, Miftah. 1997. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Pambudi, Himawan S. 2003. *Politik Pemberdayaan Dalam Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Pondok Pustaka.

Prihatmoko, Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indoensia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widjaja, Albert.1988. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: PT Kerinci Buana.

Jurnal/Skripsi/Tesis:

- Jurnal, Ibrahim Umar. *Isu strategis dalam komunikasi politik di kalangan elite daerah pada proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah*. hal 3, Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
- Jurnal, Amin Mudzakkir. “*Revivalisme Masyarakat Adat Dalam Politik Lokal Di Indonesia Pasca-Soeharto: Studi Kasus Komunitas Kampung Naga*, Tasikmalaya, Jawa Barat, hal 12-13. 2011.
- Jurnal, Putu Indah Prameswari. *Studi Kasus Tentang Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013*. (dalam Jurnal Politik Muda, Vol. 4 No. 1, Januari - Maret 2015, 137 – 143).
- Jurnal, Putu Indah Prameswari. *Studi Kasus Tentang Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013*. (dalam Jurnal Politik Muda, Vol. 4 No. 1, Januari - Maret 2015, 137 – 143).
- Skripsi, Amrianto. *Peranan Elit Tradisional Dalam Dinamika Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi 2014*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fiisp Unsrat, hal 14.
- Skripsi, I Gusti Ayu Oka Pramitha Dewi. *Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Demokratis* Bagian Hukum Pemerintah Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal 5.
- Yusdianto, 2010. *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010.
- Skripsi, Indra Purbono Ishak. *Peta Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010*, Program Studi Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2012, hal 98-99.

- Skripsi, Syaiful Huda. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suna Kalijaga Yogyakarta, hal 34-35.

Document:

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang sebelumnya ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012.

Website:

- Harianlampung.com.
Harian%20Lampung%20%20Politik%20)%2016%20Saibatin%20Pesisir%20Barat%20Sosialisasi%20Pilkada.htm (diakses pada rabu 14 september 2016, pukul 11.00 wib).
- Harianlampung.com.<http://harianlampung.com/index.php?k=politik&i=26949-bupati-pesisir-barat-jelaskan-rpjmd-di-paripurna-dprd> (diakses pada selasa 20 september 2016, pukul 14.45 wib).